

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan tentang Kesejahteraan Sosial

2.1.1. Pengertian Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan berasal dari kata “sejahtera”. Sejahtera ini mengandung pengertian dari bahasa Sanskerta “*Catera*” yang berarti Payung. Dalam konteks ini, kesejahteraan yang terkandung dalam arti “*catera*” (payung) adalah orang yang sejahtera yaitu orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman tenteram, baik lahir maupun batin. Sedangkan Sosial berasal dari kata “*Socius*” yang berarti kawan, teman, dan kerja sama. Orang yang sosial adalah orang dapat berelasi dengan orang lain dan lingkungannya dengan baik.

Jadi kesejahteraan sosial dapat diartikan sebagai suatu kondisi di mana orang dapat memenuhi kebutuhannya dan dapat berelasi dengan lingkungannya secara baik. Dalam pekerjaan sosial sering kali tingkatan kesejahteraan sosial dibagi menjadi sebagai berikut:

1. *Social security*,
2. *Social well being*,
3. *Ideal status of social welfare* (Fahrudin, 2014:8).

Istilah kesejahteraan sosial bukanlah hal baru, baik dalam wacana global maupun nasional. Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), misalnya, telah lama mengatur masalah ini sebagai salah satu bidang kegiatan masyarakat internasional. PBB

memberi batasan kesejahteraan sosial sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisasi yang bertujuan untuk membantu individu atau masyarakat guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kepentingan keluarga dan masyarakat.

Definisi ini menekankan bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu institusi atau bidang kegiatan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial, dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat (Suharto, 1997 dalam Suharto, 2014:1).

Di Indonesia, konsep kesejahteraan sosial juga telah lama dikenal. Ia telah ada dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, misalnya, merumuskan kesejahteraan sosial sebagai “Suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir dan batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak atau kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila”.

Kesejahteraan sosial memiliki beberapa makna yang relatif berbeda, meskipun substansinya tetap sama. Kesejahteraan sosial pada intinya mencakup tiga konsepsi, yaitu:

1. Kondisi kehidupan atau keadaan sejahtera, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial.

2. Institusi, arena atau bidang kegiatan yang melibatkan lembaga kesejahteraan sosial dan berbagai profesi kemanusiaan yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial.
3. Aktivitas, yakni suatu kegiatan-kegiatan atau usaha yang terorganisir untuk mencapai kondisi sejahtera (Suharto, 2014:2).

Secara umum, istilah kesejahteraan sosial sering diartikan sebagai kondisi sejahtera (konsep pertama), yaitu suatu keadaan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan perawatan kesehatan. Adapun istilah kesejahteraan sosial lainnya yaitu kesejahteraan sosial adalah suatu kegiatan atau sekumpulan kegiatan yang ditujukan untuk membantu orang-orang yang bermasalah (Huraerah, 2011).

Pengertian kesejahteraan sosial juga menunjuk pada segenap aktivitas pengorganisasian dan pendistribusian pelayanan sosial bagi kelompok masyarakat, terutama kelompok yang kurang beruntung (*disadvantaged groups*). Penyelenggaraan berbagai skema perlindungan sosial (*social protection*) baik yang bersifat formal maupun informal adalah contoh aktivitas kesejahteraan sosial (Suharto, 2014:3).

Banyak pengertian kesejahteraan sosial yang dirumuskan, baik oleh para pakar pekerjaan sosial maupun PBB dan badan-badan di bawahnya di antaranya:

Pertama, *Social welfare is the organized system of social services and institutions, designed to aid individuals and groups to attain satisfying standards of life and health, and personal and social relationships that permit them to develop their full capacities and to promote their well being in harmony with the needs of their families and the community* (Friedlander, 1980 dalam Fahrudin, 2014:10).

Kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan sosial dan institusi-institusi yang dirancang untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok guna mencapai standar hidup dan kesehatan yang memadai dan relasi-relasi personal dan sosial sehingga memungkinkan mereka dapat mengembangkan kemampuan dan kesejahteraan sepenuhnya selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakatnya.

Kedua, Perserikatan Bangsa Bangsa. Kesejahteraan sosial merupakan suatu kegiatan yang terorganisasi dengan tujuan membantu penyesuaian timbal balik antara individu-individu dengan lingkungan sosial mereka.

Ketiga, UU No. 6 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1. Kesejahteraan sosial ialah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, materiil ataupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.

Keempat, UU No. 11 Tahun 2009. UU Nomor 6 Tahun 1974 kemudian diganti dengan UU No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyatakan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Terdapat perbedaan yang signifikan pengertian kesejahteraan sosial dalam UU Nomor 6 Tahun 1974 dan UU Nomor 11 Tahun 2009. Perbedaan yang

menyolok terletak pada cara pemenuhan kesejahteraan sosial di mana dalam UU Nomor 6 Tahun 1974 sangat tegas dinyatakan dengan tetap menjunjung hak-hak asasi dan Pancasila, namun dalam UU No. 11 Tahun 2009 tidak dijelaskan dalam pengertian kesejahteraan sosial (Fahrudin, 2014:10).

Social welfare is an organized concern of all for all (Kesejahteraan sosial merupakan usaha yang terorganisasi dari semua untuk semua). Definisi semacam ini menunjukkan bahwa usaha usaha untuk mencapai kesejahteraan sosial itu adalah usaha yang dilakukan secara terencana dan terorganisasi dengan melibatkan unsur-unsur atau potensi-potensi yang ada di masyarakat. Definisi ini juga ingin menekankan bahwa kesejahteraan sosial merupakan tanggung jawab bersama (Wilson, 1956 dalam Pujileksono, 2020:15).

Social welfare is a field of activities and policies directing efforts to deal with social problem (Kesejahteraan sosial merupakan sebuah lapangan kerja/kegiatan dan usaha kebijakan secara langsung untuk memecahkan masalah sosial). Definisi ini lebih menekankan kesejahteraan sosial sebagai *setting*/bidang kegiatan yang diarahkan untuk pemecahan sosial melalui berbagai kebijakan, menurut (Compton, 1980: 27-29). *Social welfare is a device for maintaining or strengthening the existing social structure of an industrial society* (Kesejahteraan sosial adalah suatu usaha untuk memelihara atau memperkuat struktur sosial yang ada dalam masyarakat industri) (Wolins dalam Pujileksono, 2020:15).

Kesejahteraan sosial menandakan keadaan sejahtera pada umumnya, yang meliputi keadaan jasmaniah, rohaniah, dan sosial dan bukan hanya perbaikan dan

pemberantasan keburukan sosial tertentu saja; jadi merupakan suatu keadaan dan kegiatan (Suparlan dalam Suud, 2006:5 dalam Fai, 2021).

2.1.2. Tujuan Kesejahteraan Sosial

Adapun tujuan-tujuan dari kesejahteraan sosial yang akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.
2. Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan, dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan (Fahrudin, 2014:10).

Selain itu, ada tiga tujuan utama dari sistem kesejahteraan sosial yang sampai tingkat tertentu tercermin dalam semua program kesejahteraan sosial, yaitu pemeliharaan sistem, pengawasan sistem, dan perubahan sistem.

a. Pemeliharaan Sistem

Pemeliharaan dan menjaga keseimbangan atau kelangsungan keberadaan nilai-nilai dan norma sosial serta aturan-aturan kemasyarakatan dalam masyarakat, termasuk hal-hal yang bertalian dengan definisi makna dan tujuan hidup; motivasi bagi kelangsungan hidup orang seorang dan kelompok; norma-norma yang menyangkut pelaksanaan peranan anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua, dan peranan pria dan wanita; norma-norma yang berhubungan dengan produksi dan

distribusi barang dan jasa; norma-norma yang berhubungan dengan penyelesaian konflik dalam masyarakat, dan lain-lain.

Kegiatan sistem kesejahteraan sosial untuk mencapai tujuan semacam itu meliputi kegiatan yang diadakan untuk sosialisasi anggota terhadap norma-norma yang dapat diterima, peningkatan pengetahuan dan kemampuan untuk mempergunakan sumber-sumber dan kesempatan yang tersedia dalam masyarakat melalui pemberian informasi, nasihat, dan bimbingan, seperti penggunaan sistem rujukan, fasilitas pendidikan, kesehatan dan bantuan sosial lainnya.

Kegiatan lain adalah kompensasi terhadap kekurangan sistem, berupa melengkapi atau mengganti tatanan sosial lain seperti keluarga, pasar, sistem pendidikan, sistem kesehatan, dan sebagainya, sementara tatanan sosial pokok pada dasarnya tidak berubah. Termasuk juga dalam kegiatan ini, bantuan keuangan dan pembayaran jaminan sosial untuk meningkatkan daya beli, guna terpeliharanya ekonomi secara keseluruhan. Kompensasi ini sifatnya temporal.

b. Pengawasan Sistem

Melakukan pengawasan secara efektif terhadap perilaku yang tidak sesuai atau menyimpang dari nilai-nilai sosial. Kegiatan-kegiatan kesejahteraan sosial untuk mencapai tujuan semacam itu meliputi; mengintensifkan fungsi-fungsi pemeliharaan berupa kompensasi, (re) sosialisasi, peningkatan kemampuan menjangkau fasilitas-fasilitas yang ada bagi golongan masyarakat yang memperlihatkan penyimpangan tingkah laku misalnya kelompok remaja dan kelompok lain dalam masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar dapat ditingkatkan pengawasan diri sendiri (*self-control*) dengan jalan menghilangkan sebab-sebab

masalah yang sesungguhnya. Di samping itu, dapat pula dipergunakan saluran-saluran dan batasan-batasan hukum guna meningkatkan pengawasan eksternal (*external-control*) terhadap penyimpangan tingkah laku misalnya orang tua yang menelantarkan anaknya, kejahatan, kenakalan remaja, dan sebagainya.

c. Perubahan Sistem

Mengadakan perubahan ke arah berkembangnya suatu sistem yang lebih efektif bagi anggota masyarakat (Effendi, 1982; Zastrow, 1982). Dalam mengadakan perubahan itu, sistem kesejahteraan sosial merupakan instrumen untuk menyingkahkan hambatan-hambatan terhadap partisipasi sepenuhnya dan adil bagi anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan; pembagian sumber-sumber secara lebih pantas dan adil; dan terhadap penggunaan struktur kesempatan yang tersedia secara adil pula (Schneiderman, 1972 dalam Fahrudin, 2014:10).

2.1.3. Fungsi-fungsi Kesejahteraan Sosial

Fungsi-fungsi kesejahteraan sosial bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi tekanan-tekanan yang diakibatkan terjadinya perubahan-perubahan sosio-ekonomi, menghindarkan terjadinya konsekuensi-konsekuensi sosial yang negatif akibat pembangunan serta menciptakan kondisi-kondisi yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat (Friedlander & Apte, 1982 dalam Fahrudin, 2014:12).

Fungsi-fungsi kesejahteraan sosial tersebut antara lain:

1. Fungsi Pencegahan (*Preventive*)

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru. Dalam masyarakat

transisi, upaya pencegahan ditekankan pada kegiatan-kegiatan untuk membantu menciptakan pola-pola baru dalam hubungan sosial serta lembaga-lembaga sosial baru.

2. Fungsi Penyembuhan (*Curative*)

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat. Dalam fungsi ini tercakup juga fungsi pemulihan (rehabilitasi).

3. Fungsi Pengembangan (*Development*)

Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat.

4. Fungsi Penunjang (*Supportive*)

Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan kesejahteraan sosial yang lain (Fahrudin, 2014:12).

2.1.4. Perubahan Konsep Kesejahteraan Sosial

1. Konsep Residual

Program-program untuk mencapai tujuan-tujuan kesejahteraan telah berkembang sebagai hasil dari perubahan-perubahan yang terjadi dalam kurun waktu sejarah yang berbeda-beda dan dipengaruhi berbagai konsep yang berhubungan dengan tanggung jawab kemasyarakatan ataupun politis. Banyak negara pada awalnya mendasarkan kesejahteraan sosial pada konsep residual yang ditandai oleh sistem program-program tambal sulam. Landasannya adalah asumsi

yang menyatakan bahwa kewajiban sosial hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan darurat dari sebagian rakyat yang dianggap tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sendiri melalui sarana-sarana tradisional dari pasar dan keluarga. Pandangan residual menerima golongan miskin sebagai golongan masyarakat kelas yang tidak berkemampuan dan karenanya cukup diberikan pelayanan kelas dua.

2. Konsep Institusional

Menurut konsep ini, kesejahteraan sosial menjalankan fungsi garis depan dari suatu masyarakat industri yang modern dengan tujuan untuk (1) menjamin stabilitas ekonomi dan politik, (2) menyediakan sumber-sumber penunjang utama bagi warga negara, (3) pemeratakan kesempatan, (4) pemeratakan penghasilan dan kekuasaan. Pandangan ini merupakan bagian dari upaya untuk menemukan dan memberikan bagian yang sama kepada semua warga negara sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban terhadap masyarakatnya. Adanya konflik di antara ketidaksamaan antargolongan dan persamaan kewarganegaraan merupakan suatu faktor utama yang mendorong terjadinya demokratisasi amal dan terciptanya pandangan yang lebih positif tentang kesejahteraan (Fahrudin, 2014:13).

2.1.5. Kecenderungan Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial bisa juga dikatakan sebagai ilmu karena di dalam kajiannya mencakup berbagai macam konsep. Perkembangan konsep kesejahteraan sosial khususnya di negara-negara berkembang dewasa ini memberi implikasi kepada kecenderungan, kecenderungan sebagai berikut:

1. Pergeseran dari Sistem Lembaga ke Sistem Masyarakat

Pada masa lampau, kegiatan kesejahteraan sosial umumnya dijalankan di dalam lembaga pelayanan seperti panti. Keadaan ini telah mengalami perubahan di mana kegiatan-kegiatan kesejahteraan sosial lebih banyak berorientasi kepada masyarakat (*community based services*). Hal ini bukan berarti lembaga pelayanan/panti tidak diperlukan lagi. Inti kegiatan berbasis masyarakat adalah pelibatan masyarakat dalam pelayanan/kegiatan panti, baik pelayanan langsung maupun tidak langsung.

2. Profesionalisasi

Di hampir negara berkembang khususnya dalam lingkup ASEAN dewasa ini sudah semakin menyadari bahwa kegiatan-kegiatan kesejahteraan sosial harus berada di bawah kepemimpinan dan supervisi para ahli pekerjaan sosial yang memiliki kualifikasi, selain profesi lain sebagai penunjang dalam pelaksanaan kegiatan kesejahteraan sosial.

3. Partisipasi Masyarakat

Kegiatan-kegiatan kesejahteraan sosial pada tingkatan mana pun memerlukan partisipasi masyarakat. Akhir-akhir ini terdapat kecenderungan semakin meningkat partisipasi masyarakat sejak dari perencanaan, pelaksanaan dan penilaian kegiatan kesejahteraan sosial

4. Modernisasi

Salah satu ciri khas masyarakat modern adalah upaya untuk menciptakan sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya melalui perencanaan yang sistematis. Harus diakui modernisasi di bidang kesejahteraan sosial di Indonesia relatif lambat jika dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya. Dengan

modernisasi, dapat ditentukan standar pelayanan yang dapat memberikan kepuasan klien akan pelayanan dan akurasi pelayanan dengan masalah yang dihadapi klien.

5. Peningkatan Tanggung Jawab Pemerintah

Sejak dekade 1970-an, pemerintah di berbagai negara berkembang khususnya telah menunjukkan tanggung jawab yang besar dalam kepiatan-kegiatan kesejahteraan sosial.

6. Kerja Sama Internasional

Kerja sama internasional dalam kegiatan kesejahteraan sosial khususnya di negara-negara berkembang semakin meningkat. Bantuan dana dari negara lain dan badan-badan PBB dan bantuan teknis ditujukan untuk meningkatkan mutu dan tingkat pelayanan kesejahteraan sosial berdasarkan prinsip-prinsip pekerjaan sosial yang dapat diterima di seluruh dunia.

7. Indigenisasi (Pemanfaatan Unsur Lokal)

Proses bantuan internasional bagaimanapun disadari telah membawa apa yang dinamakan “Profesional imperialisme” yaitu bentuk penjajahan baru yang bertamengkan profesionalisme. Kesadaran baru khususnya di negara-negara berkembang adalah kesadaran untuk menggunakan unsur-unsur budaya lokal dalam pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial dan penerapan praktik pekerjaan sosial (Midgley, 1981 dalam Fahrudin, 2014:14).

2.1.6. Usaha Kesejahteraan Sosial

Usaha kesejahteraan sosial atau *social welfare services* pada umumnya hanya disebut sebagai pelayanan sosial atau *social services*. mengatakan “sebagai kegiatan-kegiatan terorganisasi yang terutama dan secara langsung berhubungan

dengan pemeliharaan, perlindungan, dan penyempurnaan sumber-sumber manusia, dan kegiatan ini meliputi usaha-usaha asistensi sosial, asuransi sosial, kesejahteraan anak, pencegahan kriminalitas, kesehatan mental, kesehatan masyarakat, pendidikan, rekreasi, perlindungan buruh dan perumahan” (Cassidy dikutip Friedlander, 1980 dalam Fahrudin, 2014:15).

Dalam UU No. 6 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2 disebutkan bahwa “Usaha kesejahteraan sosial adalah semua upaya, program, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara, memulihkan dan mengembangkan kesejahteraan sosial. Sementara dalam UU No. 11 Tahun 2009 dinyatakan usaha kesejahteraan sosial itu merupakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yaitu upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Dalam usaha kesejahteraan sosial, pekerjaan sosial memegang peranan sentral yaitu sebagai “*meta-institution*”. Hal ini berarti bahwa dalam usaha kesejahteraan sosial, baik yang dilaksanakan pemerintah maupun masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung maka profesi pekerjaan sosial merupakan profesi utama di dalamnya (Siporin, 1975 dalam Fahrudin, 2014:16).

2.1.7. Komponen-komponen Kesejahteraan Sosial

Semua kegiatan atau usaha kesejahteraan sosial mempunyai ciri-ciri tertentu yang membedakan dengan kegiatan-kegiatan lain:

1. Organisasi Formal

Usaha kesejahteraan sosial terorganisasi secara formal dan dilaksanakan oleh organisasi/badan sosial yang formal pula. Kegiatan yang dilaksanakan memperoleh pengakuan masyarakat karena memberikan pelayanan secara teratur, dan pelayanan yang diberikan merupakan fungsi utamanya.

2. Pendanaan

Tanggung jawab dalam kesejahteraan sosial bukan hanya tanggung jawab pemerintah melainkan juga tanggung jawab masyarakat. Mobilisasi dana dan sumber (*fund raising*) merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan. Kegiatan kesejahteraan sosial karenanya tidak mengejar keuntungan semata-mata.

3. Tuntutan Kebutuhan Manusia

Kesejahteraan sosial harus memandang kebutuhan manusia secara keseluruhan, dan tidak hanya memandang manusia dari satu aspek saja. Hal inilah yang membedakan pelayanan kesejahteraan sosial dengan yang lainnya. Pelayanan kesejahteraan sosial diadakan karena tuntutan kebutuhan manusia.

4. Profesionalisme

Pelayanan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara profesional berdasarkan kaidah ilmiah, terstruktur, sistematis, dan menggunakan metoda dan teknik-teknik pekerjaan sosial dalam praktiknya.

5. Kebijakan/Perangkat Hukum/Perundang-undangan

Pelayanan kesejahteraan sosial harus ditunjang oleh seperangkat perundang-undangan yang mengatur syarat memperoleh, proses pelayanan, dan pengakhiran pelayanan.

6. Peranserta Masyarakat

Usaha kesejahteraan sosial harus melibatkan peranserta masyarakat agar dapat berhasil dan memberi manfaat kepada masyarakat.

7. Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial

Pelayanan kesejahteraan sosial harus ditunjang dengan data dan informasi yang tepat. Tanpa data dan informasi yang tepat maka pelayanan akan tidak efektif dan tidak tepat sasaran (Fahrudin, 2014:16).

2.1.8. Bidang-bidang Kesejahteraan Sosial

Secara substantif bidang kesejahteraan sosial atau bisa juga disebut bidang usaha kesejahteraan sosial atau pelayanan sosial atau juga disebut sebagai praktik pekerjaan sosial, terdiri dari berbagai cakupan yang saling terkait erat antara lain:

1. Kesejahteraan anak dan keluarga,
2. Kesejahteraan remaja dan generasi muda,
3. Kesejahteraan orang lanjut usia,
4. Pelayanan Kesejahteraan sosial umum (*public social welfare services*),
5. Pelayanan rekreasional,
6. Pelayanan sosial koreksional,
7. Pelayanan kesehatan mental,
8. Pelayanan sosial medis,
9. Pelayanan sosial bagi penyandang cacat,
10. Pelayanan sosial bagi wanita,
11. Pelayanan sosial perumahan dan lingkungan.

Jika mengikuti pembagian dalam praktik pekerjaan sosial (dan ini yang paling biasa digunakan dalam literatur pekerjaan sosial) maka bidang-bidang tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Pekerjaan sosial dengan anak dan keluarga,
2. Pekerjaan sosial dengan remaja,
3. Pekerjaan sosial dengan orang lanjut usia,
4. Pekerjaan sosial dengan publik/masyarakat,
5. Pekerjaan sosial koreksional,
6. Pekerjaan sosial medis,
7. Pekerjaan sosial dengan penyandang cacat,
8. Pekerjaan sosial sekolah,
9. Pekerjaan sosial industri/pekerjaan (*occupational social work*),
10. Pekerjaan sosial wanita (*feminist social work*),
11. Pekerjaan sosial dan keluarga berencana,
12. Pekerjaan sosial dengan narkoba dan HIV/AIDS,
13. Pekerjaan sosial psikiatri,
14. Pekerjaan sosial dan kesehatan mental,
15. Pekerjaan sosial dengan organisasi,
16. Dan masih banyak penyebutan/pembidangan pekerjaan sosial yang lain (Fahrudin, 2014:17).

2.2. Tinjauan tentang Pekerjaan Sosial

2.2.1. Pengertian Pekerjaan Sosial

Mendefinisikan pekerjaan sosial memerlukan gambaran peran dan fungsi pekerja sosial. Pemahaman atas peran dan fungsi pekerja sosial, dapat memudahkan untuk mendefinisikan profesi ini agar berbeda dengan profesi lainnya. Telah banyak usaha dilakukan untuk mendefinisikan pekerjaan sosial, meskipun ada beberapa ketidaksepakatan dalam upaya pengemukaan definisi umum tentang pekerjaan sosial. Tanpa kesepakatan umum mengenai apa yang dimaksud pekerjaan sosial, sulit untuk secara definitif menggambarkan peran dan fungsi pekerjaan sosial yang ideal. Sebagai contoh, saat perumusan Rancangan Undang undang Pekerja Sosial di Indonesia (2018), terjadi perbedaan pendapat dan penafsiran tentang pekerjaan sosial. Baik di kalangan legislatif, akademisi, praktisi, maupun masyarakat awam.

Kegagalan untuk mencapai kesepakatan tentang definisi pekerjaan sosial sebagian menyumbang kesenjangan antara yang dikatakan dan ingin dicapai melalui praktik pekerjaan sosial. Hampir tidak mungkin untuk menemukan definisi sederhana tentang pekerjaan sosial yang memungkinkan setiap orang untuk setuju (Cree, 2003:3 dalam Pujileksono, 2019:26).

Pekerjaan sosial adalah seni, ilmu pengetahuan, profesi yang membantu orang memecahkan masalah pribadi, kelompok (terutama keluarga), dan masyarakat untuk mencapai hubungan pribadi, kelompok, dan masyarakat yang memuaskan, melalui praktik pekerjaan sosial (Farley dan Smith, 2006:7 dalam Pujileksono, 2019:26).

Definisi ini menunjukkan bahwa pekerjaan sosial merupakan ilmu pengetahuan praktis yang memiliki tujuan memecahkan masalah sosial. Definisi yang paling komprehensif dan otoritatif. Pekerjaan sosial adalah profesi yang mempromosikan perubahan sosial, pemecahan masalah dalam hubungan manusia dan pemberdayaan serta pembebasan orang untuk meningkatkan kesejahteraan. Dengan memanfaatkan teori perilaku manusia dan sistem sosial, intervensi (campur tangan) pekerjaan sosial dimulai pada titik di mana orang berinteraksi dengan lingkungannya. Prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial sangat penting bagi pekerjaan sosial (*International Association of Schools of Social Work*, 2001 dalam Pujileksono, 2019:27).

Pekerjaan sosial terdiri dari upaya terorganisasi dan sistematis untuk menjamin kepuasan pribadi dan sosial tertinggi bagi individu, kelompok, dan masyarakat. Pekerjaan sosial dalam berbagai bentuknya membahas banyak transaksi kompleks antara orang dan lingkungannya, serta bertujuan memungkinkan semua orang untuk mengembangkan potensinya secara optimal, memperkaya hidupnya, dan mencegah disfungsi.

Pekerjaan sosial adalah profesi pertolongan dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, terutama untuk kelompok yang paling rentan atau kelompok kurang beruntung. Kelompok rentan maksudnya adalah kelompok yang kemungkinan besar akan mendapatkan perlakuan secara diskriminatif, eksploitatif, marginalisasi, stigmatisasi, dan isolasi. Kelompok rentan di antaranya anak-anak, perempuan, lanjut usia, penyandang disabilitas, transgender, masyarakat miskin (Pujileksono, 2019:27).

Berikut ini diuraikan arti pekerjaan sosial menurut beberapa asosiasi:

1. Menurut Federasi Pekerja Sosial Internasional (*International Social Work Federation*)

Pekerjaan sosial adalah profesi berbasis praktik dan disiplin akademis yang mendorong perubahan dan pengembangan sosial, kohesi sosial, dan pemberdayaan dan pembebasan orang. Prinsip keadilan sosial, hak asasi manusia, tanggung jawab kolektif dan penghormatan terhadap keragaman merupakan hal yang penting dalam pekerjaan sosial. Didukung oleh teori pekerja sosial, ilmu sosial, humaniora dan pengetahuan murni, pekerja sosial melibatkan orang dan struktur untuk mengarasi tantangan hidup dan meningkatkan kesejahteraan.

2. Menurut Asosiasi Pekerja Sosial Kanada

Pekerjaan sosial adalah profesi yang berkaitan dengan membantu individu, keluarga, kelompok dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan individu dan kolektif. Tujuannya untuk membantu orang mengembangkan keterampilan dan kemampuan untuk menggunakan sumber daya mereka sendiri dan masyarakat untuk menyelesaikan masalah. Pekerjaan sosial berkaitan dengan masalah individu dan pribadi tetapi juga dengan masalah sosial yang lebih luas seperti kemiskinan, pengangguran dan kekerasan dalam rumah tangga.

3. Menurut Asosiasi Pekerja Sosial Nasional (*National Social Work Association*)

Praktik pekerja sosial terdiri dari penerapan nilai nilai kerja, prinsip, dan teknik kerja profesional untuk satu atau lebih dari hal-hal berikut: Membantu orang mendapatkan layanan sosial: Konseling dan psikoterapi dengan individu, keluarga,

dan kelompok: Membantu masyarakat atau kelompok menyediakan atau memperbaiki layanan sosial dan kesehatan: dan berpartisipasi dalam proses legislatif. Praktik pekerja sosial membutuhkan pengetahuan tentang perkembangan dan perilaku manusia: Lembaga sosial dan ekonomi, dan budaya: serta interaksi dari semua faktor ini.

4. Menurut Asosiasi Pekerja Sosial Inggris

Pekerja sosial bekerja dengan individu dan keluarga untuk membantu memperbaiki hasil dalam kehidupannya, membantu melindungi orang-orang yang rentan dari bahaya atau pelecehan serta mendukung orang untuk hidup mandiri. Pekerja sosial mendukung orang, bertindak sebagai pendukung dan mengarahkan orang ke pelayanan. Pekerja sosial sering bekerja dalam tim multi disiplin bersama profesional kesehatan dan pendidikan.

5. Menurut Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

Berdasarkan definisi pekerjaan sosial tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pekerjaan sosial merupakan profesi pertolongan pada individu, kelompok, komunitas, dan masyarakat yang didasarkan teori pekerjaan sosial, metode pekerjaan sosial dan prinsip prinsip pekerjaan sosial (Pujileksono, 2019:30).

2.2.2. Tujuan Pekerjaan Sosial

Misi utama profesi pekerjaan sosial menurut NASW adalah untuk meningkatkan kesejahteraan manusia (*human well-being*) dan membantu memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar manusia, dengan perhatian khusus pada kebutuhan-kebutuhan orang-orang rawan, tertindas, dan miskin. Misi pekerjaan sosial tersebut diterjemahkan menjadi tujuan pekerjaan sosial yang memberikan arah yang lebih jelas.

Tujuan praktik pekerjaan sosial adalah:

1. Meningkatkan kemampuan-kemampuan orang untuk memecahkan masalah, mengatasi (*coping*), perkembangan.
2. Menghubungkan orang dengan sistem-sistem yang memberikan kepada mereka sumber-sumber, pelayanan-pelayanan, dan kesempatan-kesempatan.
3. Memperbaiki keefektifan dan bekerjanya secara manusiawi dari sistem-sistem yang menyediakan orang dengan sumber: sumber dan pelayanan-pelayanan.
4. Mengembangkan dan memperbaiki kebijakan sosial (NASW dalam Zastrow, 2008).

Selain keempat tujuan itu, ditambahkan empat tujuan lagi yang dikemukakan oleh CSWE sebagai berikut:

5. Meningkatkan kesejahteraan manusia dan mengurangi kemiskinan, penindasan, dan bentuk-bentuk ketidakadilan sosial lainnya.

6. Mengusahakan kebijakan, pelayanan, dan sumber-sumber melalui advokasi dan tindakan-tindakan sosial dan politik yang meningkatkan keadilan sosial dan ekonomi.
7. Mengembangkan dan menggunakan penelitian, pengetahuan, dan keterampilan yang memajukan praktik pekerjaan sosial.
8. Mengembangkan dan menerapkan praktik dalam konteks budaya yang bermacam-macam (Zastrow, 2008 dalam Fahrudin, 2014:67).

2.2.3. Unsur-unsur Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial sebagai profesi mempunyai empat unsur utama, yang pada umumnya, tiga unsur di antaranya dikatakan sebagai pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Tetapi kalau kita teliti lebih jauh, sikap dan keterampilan sudah bersatu dengan individunya, sedangkan pengetahuan terlepas dari individu. Sikap adalah kecenderungan yang relatif bertahan lama dari seorang individu untuk mengamati, merasakan, berpikir, dan bertindak dalam suatu cara tertentu terhadap suatu objek tertentu (Komorita, Neel, & Wagman, 1962 dalam Fahrudin, 2014:65).

Kalau unsur-unsur tersebut akan dipisahkan dari orangnya, maka unsur-unsur tersebut menjadi “pengetahuan”, “nilai-nilai”, yaitu yang mendasari sikap, dan “metode serta teknik” yang akan digunakan dalam proses pertolongan. Hal ini sejalan dengan definisi kerja “praktik pekerjaan sosial” yang komponennya secara lengkap adalah: nilai, maksud atau misi, sanksi yang berarti kewenangan untuk melaksanakan praktik, pengetahuan dan metode (Bartlett, 1988 dalam Fahrudin, 2014:65).

Unsur-unsur inti yang mendasari pekerjaan sosial di mana pun dipraktikkan adalah sebagai berikut:

1. Maksud/tujuan profesi itu.
2. Nilai-nilai dan etika.
3. Dasar pengetahuan praktik langsung.
4. Metode-metode dan proses-proses yang dilakukan (Hepworth, Rooney, dan Larsen, 2002 dalam Fahrudin, 2014:65).

Dengan demikian seseorang yang memasuki lembaga pendidikan pekerjaan sosial akan mempelajari pengetahuan, nilai-nilai serta etika, dan metode serta teknik pekerjaan sosial dari lembaga pendidikan tersebut. Setelah semua itu dipelajari dan dikuasai, maka dalam diri calon pekerja sosial ini akan terbentuk “kemampuan melakukan analisis (dilandasi oleh pengetahuan), “sikap” (dilandasi oleh nilai-nilai yang diyakini dan dianut), dan “keterampilan” (dilandasi oleh metode dan teknik yang telah dipelajari dan dikuasai). Dengan berpedoman pada ilmu pengetahuan yang telah dipelajarinya, serta dibimbing oleh nilai-nilai yang dianutnya, pekerja sosial menggunakan keterampilannya dalam membantu individu, kelompok atau masyarakat (Fahrudin, 2014:66).

2.2.4. Pendekatan Pekerjaan Sosial

Praktik pekerjaan sosial dilaksanakan dalam dua cara, yaitu secara langsung berhadapan dengan klien, baik secara individual maupun dalam kelompok, dan secara tidak langsung berhadapan dengan klien, dalam arti memusatkan perhatian pada institusi kesejahteraan sosial, pada lembaga-lembaga atau organisasi kesejahteraan sosial, pada evaluasi, analisis, perumusan dan pengembangan

program-program kesejahteraan sosial. Pendekatan praktik semacam ini kadang-kadang disebut juga sebagai jalur klinis dan jalur perubahan sosial pelayanan pada individu, keluarga, dan kelompok, dan pelayanan perubahan sosial, pelayanan mikro dan makro. Tetapi penggunaan istilah praktik langsung (*direct practice*) dan praktik tidak langsung (*indirect practice*) lebih umum digunakan (Fahrudin, 2014:70).

Dalam kaitan dengan masyarakat, pekerjaan sosial pada umumnya menggunakan praktik tidak langsung. Tetapi ada aspek-aspek dalam bekerja dengan masyarakat yang bersifat praktik atau pelayanan langsung. Hal ini misalnya kalau pekerja sosial memberikan pelayanan kepada kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi masyarakat yang memerlukan pelayanan langsung (Gilbert, Miller, & Specht, 1980 dalam Fahrudin, 2014:71).

2.2.5. Metode Pekerjaan Sosial

Secara tradisional pekerjaan sosial dikatakan mempunyai tiga metode pokok dan tiga metode pembantu. Metode pokok tersebut adalah *social case work*, *social group work*, dan *community organization/community development*. Sedangkan metode pembantunya adalah *social work administration*, *social action*, dan *social work research*. Tetapi pandangan semacam ini telah ama ditinggalkan, kira-kira sekitar dua atau tiga dekade yang lalu. Oleh karena itu, digunakan dua pendekatan, yaitu praktik langsung (*direct ice*) dan praktik tidak langsung (*indirect practice*) sebagaimana tersebut di atas.

Karena dalam praktik langsung, untuk suatu kasus tertentu, pekerja sosial dituntut untuk tidak hanya berhadapan dengan klien secara individu saja, tetapi

kadang-kadang harus berhadapan dengan kelompok atau bahkan juga dengan masyarakat, maka pekerja sosial harus memiliki pengetahuan dan keterampilan, tidak hanya tentang dinamika individu, kelompok, atau masyarakat saja, tetapi sampai batas-batas tertentu harus memiliki semua pengetahuan dan keterampilan itu. Dengan demikian pekerja sosial sekarang dituntut untuk bekerja sebagai pekerja sosial generalis (*generalist social worker*) (Fahrudin, 2014:71).

Dengan tidak digunakannya *social case work*, *social group work*, dan *community organization/community development* sebagai metode pekerjaan sosial, agak sukar juga untuk mencari ganti apa metode pekerjaan sosial itu. Terutama sukar bagi mereka yang sudah terbiasa dengan menggunakan kata metode untuk *social case work*, *social group work*, dan *community organization* tersebut, setidaknnya untuk permulaan.

Metode menunjukkan “bagaimana” membantu, yaitu kegiatan instrumental yang bertujuan dan berencana yang melalui kegiatan ini tugas-tugas dilaksanakan dan tujuan-tujuan dicapai. Dalam praktik pekerjaan sosial, metode menunjukkan penggunaan secara teratur atas cara-cara, sumber-sumber, dan prosedur-prosedur, melalui pelaksanaan jenis peranan-peranan pertolongan seperti sebagai konselor, penasihat, pemungkin, konsultan, administrator, guru, pembimbing, model, perencana, peneliti, dan sebagainya (Siporin, 1975 dalam Fahrudin, 2014:72).

Metode terdiri atas pelaksanaan peranan interventif yang mengikuti prosedur yang melaksanakan tugas-tugas seperti *engagement*, perumusan kontrak, *assessment*, perencanaan, dan pelaksanaan intervensi. Intervensi adalah tindakan-tindakan yang menghasilkan perubahan dan menyediakan sumber-sumber, sekecil

suatu teknik tertentu atau sebesar penyediaan sosial (*social provision*), seperti membuat interpretasi, atau membuat rujukan ke lembaga lain, atau pengembangan suatu program pelayanan sosial. Prosedur menunjukkan aliran dan kumpulan tindakan interventif yang berorientasi tugas yang berpolakan peranan.

Strategi adalah kumpulan prosedur yang melibatkan garis tindakan berencana dan penggunaan sumber-sumber, seperti strategi pendidikan yang melibatkan penggunaan media massa untuk membujuk orang memperoleh dukungan mereka untuk usulan legislatif. Teknik adalah bentuk perilaku intervensi spesifik dan terbatas, seperti mengatakan "hmhm"; "mengusap"; mengelilingi meja dalam suatu kelompok, dan sebagainya (Siporin, 1975 dalam Fahrudin, 2014:72).

2.2.6. Peran Pekerjaan Sosial

Ada beberapa peran pekerjaan sosial dalam pembimbingan sosial. Lima peran di bawah ini sangat relevan diketahui oleh para pekerja sosial yang akan melakukan pendampingan sosial adalah sebagai berikut:

1. Fasilitator

Dalam literatur pekerjaan sosial, peranan "fasilitator" sering disebut sebagai "pemungkin" (*enabler*). Keduanya bahkan sering dipertukarkan satu-sama lain. "*The traditional role of enabler in social work implies education, facilitation, and promotion of interaction and action.*" (Parsons, Jorgensen dan Hernandez, 1994:188 dalam Suharto, 2014:98). Selanjutnya memberi definisi pemungkin atau fasilitator sebagai tanggungjawab untuk membantu klien menjadi mampu menangani tekanan situasional atau transisional (Barker, 1987 dalam Suharto, 2014:98).

Strategi-strategi khusus untuk mencapai tujuan tersebut meliputi: pemberian harapan, pengurangan penolakan dan ambivalensi, pengakuan dan pengaturan perasaan-perasaan, pengidentifikasian dan pendorongan kekuatan-kekuatan personal dan asset-asset sosial, pemilahan masalah menjadi beberapa bagian sehingga lebih mudah dipecahkan, dan pemeliharaan sebuah fokus pada tujuan dan cara-cara pencapaiannya (Barker, 1987:49 dalam Suharto, 2014:98).

Pengertian ini didasari oleh visi pekerjaan sosial bahwa “setiap perubahan terjadi pada dasarnya dikarenakan oleh adanya usaha-usaha klien sendiri, dan peranan pekerja sosial adalah memfasilitasi atau memungkinkan klien mampu melakukan perubahan yang telah ditetapkan dan disepakati bersama (Parsons, Jorgensen dan Hernandez, 1994 dalam Suharto, 2014:98).

Adapun kerangka acuan mengenai tugas-tugas yang dapat dilakukan oleh pekerja sosial:

- a. Mendefinisikan keanggotaan atau siapa yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan. Mendefinisikan tujuan keterlibatan.
- b. Mendorong komunikasi dan relasi, serta menghargai pengalaman dan perbedaan-perbedaan.
- c. Memfasilitasi keterikatan dan kualitas sinergi sebuah sistem: menemukan kesamaan dan perbedaan.
- d. Memfasilitasi pendidikan: membangun pengetahuan dan keterampilan.
- e. Memberikan model atau contoh dan memfasilitasi pemecahan masalah bersama: mendorong kegiatan kolektif.

- f. Mengidentifikasi masalah-masalah yang akan dipecahkan. Memfasilitasi penetapan tujuan.
- g. Merancang solusi-solusi alternatif.
- h. Mendorong pelaksanaan tugas.
- i. Memelihara relasi sistem.
- j. Memecahkan konflik (Parsons, Jorgensen dan Hernandez, 1994:190-203 dalam Suharto, 2014:98).

2. Broker

Dalam pengertian umum, seorang broker membeli dan menjual saham dan surat berharga lainnya di pasar modal. Seorang broker berusaha untuk memaksimalkan keuntungan dari transaksi tersebut sehingga klien dapat memperoleh keuntungan sebesar mungkin. Pada saat klien menyewa seorang broker, klien meyakini bahwa broker tersebut memiliki pengetahuan mengenai pasar modal, pengetahuan yang diperoleh terutama berdasarkan pengalamannya sehari-hari (Suharto, 2014:99).

Dalam konteks pendampingan sosial, peran pekerja sosial sebagai broker tidak jauh berbeda dengan peran broker di pasar modal. Seperti halnya di pasar modal, terdapat klien atau konsumen. Namun demikian, pekerja sosial melakukan transaksi dalam pasar lain, yakni jaringan pelayanan sosial. Pemahaman pekerja sosial yang menjadi broker mengenai kualitas pelayanan sosial di sekitar lingkungannya menjadi sangat penting dalam memenuhi keinginan kliennya memperoleh “keuntungan” maksimal.

Dalam proses pendampingan sosial, ada tiga prinsip utama dalam melakukan peranan sebagai broker:

- a. Mampu mengidentifikasi dan melokalisir sumber-sumber kemasyarakatan yang tepat.
- b. Mampu menghubungkan konsumen atau klien dengan sumber secara konsisten.
- c. Mampu mengevaluasi efektivitas sumber dalam kaitannya dengan kebutuhan-kebutuhan klien.

Prinsip-prinsip tersebut sesuai dengan makna broker seperti telah jelaskan di muka. Peranan sebagai broker mencakup “menghubungkan klien dengan barang-barang dan pelayanan dan mengontrol kualitas barang dan pelayanan tersebut. Dengan demikian ada tiga kata kunci dalam pelaksanaan peran sebagai broker, yaitu: menghubungkan (*linking*), barang, barang dan pelayanan (*goods and services*) dan pengontrolan kualitas (*quality control*) yang akan dijabarkan sebagai berikut:

- a. *Linking* adalah proses menghubungkan orang dengan lembaga-lembaga atau pihak-pihak lainnya yang memiliki sumber-sumber yang diperlukan. Linking juga tidak sebatas hanya memberi petunjuk kepada orang mengenai sumber-sumber yang ada. Lebih dari itu, ia juga meliputi memperkenalkan klien dan sumber referal, tindak lanjut, pendistribusian sumber, dan menjamin bahwa barang-barang dan jasa dapat diterima oleh klien.
- b. *Goods* adalah barang-barang yang nyata, seperti makanan, uang, pakaian, perumahan, obat-obatan. Sedangkan *services* mencakup keluaran pelayanan

lembaga yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan hidup klien, semisal perawatan kesehatan, pendidikan, pelatihan, konseling, pengasuhan anak.

- c. *Quality Control* adalah proses pengawasan yang dapat menjamin bahwa produk-produk yang dihasilkan lembaga memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Proses ini memerlukan monitoring yang terus menerus terhadap lembaga dan semua jaringan pelayanan untuk menjamin bahwa pelayanan memiliki mutu yang dapat dipertanggungjawabkan setiap saat (Parsons, Jorgensen dan Hernandez, 1994:226-227 dalam Suharto, 2014:100).

Dalam melaksanakan peran sebagai broker, ada dua pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki pekerja sosial:

- a. Pengetahuan dan keterampilan melakukan asesmen kebutuhan masyarakat (*community needs assessment*), yang meliputi: (a) jenis dan tipe kebutuhan, (b) distribusi kebutuhan, (c) kebutuhan akan pelayanan, (d) pola-pola penggunaan pelayanan, dan (e) hambatan. hambatan dalam menjangkau pelayanan.
- b. Pengetahuan dan keterampilan membangun konsorsium dan jaringan antar organisasi. Kegiatan ini bertujuan untuk: (a) memperjelas kebijakan-kebijakan setiap lembaga, (b) mendefinisikan peranan lembaga-lembaga, (c) mendefinisikan potensi dan hambatan setiap lembaga, (d) memilih metode guna menentukan partisipasi setiap lembaga dalam memecahkan masalah sosial masyarakat, (e) mengembangkan prosedur guna menghindari duplikasi pelayanan, dan (f) mengembangkan prosedur guna

mengidentifikasi dan memenuhi kekurangan pelayanan sosial (Suharto, 2014:100).

3. Mediator

Pekerja sosial sering melakukan peran mediator dalam berbagai kegiatan pertolongannya. Peran ini sangat penting dalam paradigma generalis. Peran mediator diperlukan terutama pada saat terdapat perbedaan yang mencolok dan mengarah pada konflik antara berbagai pihak. Salah satu contoh bahwa pekerja sosial dapat memerankan sebagai “fungsi kekuatan ketiga” untuk menjembatani antara anggota kelompok dan sistem lingkungan yang menghambatnya (Lee dan Swenson, 1986 dalam Suharto, 2014:101).

Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam melakukan peran mediator meliputi kontrak perilaku, negosiasi, pendamai pihak ketiga, serta berbagai macam resolusi konflik. Dalam mediasi, upaya-upaya yang dilakukan pada hakekatnya diarahkan untuk mencapai “solusi menang-menang” (*win-win solution*). Hal ini berbeda dengan peran sebagai pembela di mana bantuan pekerja sosial diarahkan untuk memenangkan kasus klien atau membantu klien memenangkan dirinya sendiri.

Beberapa teknik dan keterampilan yang dapat digunakan dalam melakukan peran mediator:

- a. Mencari persamaan nilai dari pihak-pihak yang terlibat konflik.
- b. Membantu setiap pihak agar mengakui legitimasi kepentingan pihak lain.
- c. Membantu pihak-pihak yang bertikai dalam mengidentifikasi kepentingan bersama.

- d. Hindari situasi yang mengarah pada munculnya kondisi menang dan kalah.
- e. Berupaya untuk melokalisir konflik ke dalam isu, waktu dan tempat yang spesifik.
- f. Membagi konflik kedalam beberapa isu.
- g. Membantu pihak-pihak yang bertikai untuk mengakui bahwa mereka lebih memiliki manfaat jika melanjutkan sebuah hubungan ketimbang terlibat terus dalam konflik.
- h. Memfasilitasi komunikasi dengan cara mendukung mereka agar mau berbicara satu sama lain.
- i. Gunakan prosedur-prosedur persuasi (Compton dan Galaway, 1989:511 dalam Suharto, 2014:101).

4. Pembela

Seringkali pekerja sosial harus berhadapan sistem politik dalam rangka menjamin kebutuhan dan sumber yang diperlukan oleh klien atau dalam melaksanakan tujuan-tujuan pendampingan sosial. Manakala pelayanan dan sumber-sumber sulit dijangkau oleh klien, pekerja sosial harus memainkan peranan sebagai pembela (advokat) (Suharto, 2014:102).

Peran pembelaan atau advokasi merupakan salah satu praktek pekerjaan sosial yang bersentuhan dengan kegiatan politik. Peran pembelaan dapat dibagi dua: advokasi kasus (*case advocacy*) dan advokasi kausal (*cause advocacy*) (DuBois dan Miley, 1992: Parsons, Jorgensen dan Hernandez, 1994 dalam Suharto, 2014:102).

Apabila pekerja sosial melakukan pembelaan atas nama seorang klien secara individual, maka ia berperan sebagai pembela kasus. Pembelaan kausal terjadi

manakala klien yang dibela pekerja sosial bukanlah individu melainkan sekelompok anggota masyarakat.

Beberapa model yang dapat dijadikan acuan dalam melakukan peran pembela dalam pendampingan sosial:

- a. Keterbukaan: membiarkan berbagai pandangan untuk didengar.
- b. Perwakilan luas: mewakili semua pelaku yang memiliki kepentingan dalam pembuatan keputusan.
- c. Keadilan: memperjuangkan sebuah sistem kesetaraan atau kesamaan sehingga posisi-posisi yang berbeda dapat diketahui sebagai bahan perbandingan.
- d. Pengurangan permusuhan: mengembangkan sebuah keputusan yang mampu mengurangi permusuhan dan keterasingan.
- e. Informasi: menyajikan masing-masing pandangan secara bersama dengan dukungan dokumen dan analisis.
- f. Pendukung: mendukung partisipasi secara luas.
- g. Kepekaan: mendorong para pembuat keputusan untuk benar-benar mendengar, mempertimbangkan dan peka terhadap minat-minat dan posisi-posisi orang lain (Rothblatt, 1978 dalam Suharto, 2014:102).

5. Pelindung

Tanggungjawab pekerja sosial terhadap masyarakat didukung oleh hukum. Hukum tersebut memberikan legitimasi kepada pekerja sosial untuk menjadi pelindung (*protector*) terhadap orang-orang yang lemah dan rentan. Dalam melakukan peran sebagai pelindung (*guardian role*), pekerja sosial bertindak

berdasarkan kepentingan korban, calon korban, dan populasi yang berisiko lainnya (Suharto, 2014:103).

Peranan sebagai pelindung mencakup penerapan berbagai kemampuan yang menyangkut: (a) kekuasaan, (b) pengaruh, (c) otoritas, dan (d) pengawasan sosial.

Tugas-tugas peran pelindung meliputi:

- a. Menentukan siapa klien pekerja sosial yang paling utama.
- b. Menjamin bahwa tindakan dilakukan sesuai dengan proses perlindungan.
- c. Berkomunikasi dengan semua pihak yang terpengaruh oleh tindakan sesuai dengan tanggungjawab etis, legal dan rasional praktek pekerjaan sosial (Suharto, 2014:103).

2.2.7. Keterampilan-keterampilan Pekerjaan Sosial

Keterampilan-keterampilan yang penting bagi pelaksanaan praktik pekerjaan sosial adalah sebagai berikut:

1. Keterampilan dalam mendengarkan orang lain dengan pengertian dan tujuan.
2. Keterampilan dalam mendapatkan informasi dan dalam mengumpulkan fakta yang relevan untuk mempersiapkan riwayat sosial, asesmen (penilaian), dan laporan. Keterampilan dalam menciptakan dan mempertahankan hubungan pertolongan profesional dan dalam menggunakan diri sendiri dalam hubungan.
3. Keterampilan dalam mengamati dan menafsirkan perilaku verbal dan nonverbal dan dalam menggunakan pengetahuan tentang teori kepribadian dan metode-metode diagnostik. Keterampilan dalam menyertakan klien

dalam usaha untuk memecahkan masalah mereka sendiri dan dalam memperoleh kepercayaan.

4. Keterampilan dalam mendiskusikan masalah-masalah emosional yang sensitif dalam cara yang mendukung dan tidak mengancam.
5. Keterampilan dalam menciptakan solusi inovatif atas kebutuhan-kebutuhan klien.
6. Keterampilan dalam menentukan kebutuhan untuk mengakhiri hubungan terapeutik dan bagaimana melakukannya.
7. Keterampilan dalam menafsirkan temuan-temuan penelitian dan literatur profesional.
8. Keterampilan dalam memediasi dan negosiasi antara pihak-pihak yang saling konflik.
9. Keterampilan dalam menyediakan pelayanan penghubung antarorganisasi.
10. Keterampilan dalam menafsirkan atau mengomunikasikan kebutuhan-kebutuhan sosial kepada sumber-sumber pemberi dana, publik, atau para legislator (*National Association of Social Workers (NASW)*, Zastrow, 2008 dalam Fahrudin, 2014:73).

Berkaitan dengan keterampilan-keterampilan penting ini, NASW juga mengidentifikasi kemampuan-kemampuan yang diperlukan untuk praktik pekerjaan sosial:

1. Kemampuan untuk berbicara dan menulis dengan jelas.
2. Kemampuan untuk mengajar orang lain.

3. Kemampuan untuk merespons secara mendukung dalam situasi-situasi krisis atau penuh emosi.
4. Kemampuan untuk bertindak sebagai model peranan dalam hubungan profesional.
5. Kemampuan untuk menafsirkan gejala psikososial yang kompleks.
6. Kemampuan untuk mengatur beban kerja untuk memenuhi tanggung jawab.
7. Kemampuan untuk mengidentifikasi dan mendapatkan sumber-sumber yang diperlukan untuk membantu orang lain.
8. Kemampuan untuk menilai kinerja dan perasaan-perasaan sendiri, dan untuk menggunakan pertolongan dan konsultasi,
9. Kemampuan untuk berpartisipasi dalam dan memimpin kegiatan-kegiatan kelompok.
10. Kemampuan untuk berfungsi walaupun dalam keadaan stres.
11. Kemampuan untuk mengatasi situasi-situasi konflik atau kepribadian-kepribadian yang suka bertengkar.
12. Kemampuan untuk menghubungkan teori sosial dan psikologis pada situasi praktik.
13. Kemampuan untuk mengidentifikasi informasi yang perlu untuk memecahkan suatu masalah.
14. Kemampuan untuk melakukan penelitian tentang pelayanan lembaga atau praktik diri sendiri (dalam Zastrow, 2008).

Demikian gambaran singkat tentang profesi pekerjaan sosial. Untuk dapat mendalami dan khususnya untuk dapat melaksanakan praktik pekerjaan sosial tentu

harus mengikuti pendidikan khusus dengan praktikum sebagai bagian yang integral (Fahrudin, 2014:74).

2.3. Tinjauan tentang Keberfungsian Sosial

2.3.1. Pengertian Keberfungsian Sosial

Keberfungsian sosial (*social functioning*) merupakan terma teknikal yang mendukung fokus profesi pekerjaan sosial pada transaksi-transaks, manusia dalam lingkungannya (Boehm, dalam Fahrudin, 2018:10). Hal ini merujuk kepada kemampuan klien untuk melaksanakan tugas kehidupannya sehari-hari (termasuk mendapatkan makanan, tempat tinggal, dan transportasi) dan memenuhi peranan-peranan sosial utamanya sebagaimana diharapkan oleh masyarakat atau subbudaya klien (Karis & Wandrei, 1994 dalam Fahrudin, 2018:10).

Oleh karena itu, tanpa memahami konsep keberfungsian sosial maka seorang pekerja sosial tidak akan dapat membedakan antara dirinya dengan profesi lain, dan dia kehilangan identitas diri dan profesinya. Keberfungsian sosial merupakan sebuah konsep pembeda antara profesi pekerjaan sosial dengan profesi lainnya seperti berikut:

Social functioning is a helpful concept because it takes into consideration both the environment characteristics of the person and the forces from the environment. It suggests that a person brings to the situation a set of behaviors, needs, and beliefs that are the result of his or her unigue experiences from birth. Yet it also recognizes that whatever is brought to the situation must be related to the world as that person confronts it. It is in the transactions between the person

and the parts of that person world that the quality of life can be enhanced or damaged (Morales dan Sheafor, 1999 dalam Fahrudin, 2018:10).

Konsep keberfungsian sosial tidak terlepas dari karakteristik orang dalam konteks lingkungan sosialnya. “*Social functioning refers to the way individuals or collectivities (families, associations, communities, and so on) behave in order to carry out their life task and meet their needs*” (Siporin, 1979 dalam Fahrudin, 2018:10).

Keberfungsian sosial menunjuk pada cara-cara individu-individu maupun kolektivitas dalam rangka melaksanakan tugas-tugas kehidupannya dan memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu keberfungsian seseorang sangat berkaitan dengan peranan-peranan sosialnya sehingga keberfungsian sosial dapat pula diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang dianggap penting dalam menampilkan beberapa peranan yang diharapkan atau yang seyogianya ditampilkan oleh setiap orang karena keanggotaannya dalam kelompok-kelompok sosial.

Adapun definisi keberfungsian sosial sebagai kemampuan orang (individu, keluarga, kelompok atau masyarakat) dan sistem sosial (lembaga dan jaringan sosial) dalam memenuhi/merespon kebutuhan dasar, menjalankan peranan sosial, serta menghadapi goncangan dan tekanan (*shocks and stresses*) (Suharto, 2014:28).

Keberfungsian sosial positif adalah kemampuan orang untuk menangani tugas-tugas dan aktivitasnya yang penting dalam memenuhi kebutuhan dasarnya dan melaksanakan peranan sosial utamanya sebagaimana yang diharapkan oleh kebudayaan dari suatu komunitas yang khusus (Karls & Wandrei, 1998, Longres, 1995 dalam Fahrudin, 2018:11).

Peranan sosial yang utama, yaitu menjadi anggota dalam keluarga, orang tua, pasangan, mahasiswa, pasien, pegawai, tetangga dan warga negara. Peranan sosial orang berubah melalui kehidupan dan harapan tentang peranan ini berbeda tergantung kepada gender orang, suku bangsa, budaya, agama, pekerjaan dan komunitas. Sebagian ahli berpendapat bahwa konsep keberfungsian sosial terfokus pada keserasian antara kapasitas individu dengan tindakan dan tuntutan, harapan, sumber-sumber serta kesempatan dalam lingkungan sosial dan ekonominya.

Pekerjaan sosial berhubungan dengan keberfungsian sosial semua orang tapi prioritasnya yaitu pada masalah pemenuhan kebanyakan anggota-anggota masyarakat yang rentan. Pada dasarnya masyarakat yang rentan ini adalah korban dari situasi pengabaian, ketidakadilan sosial, diskriminasi dan penindasan. Termasuk juga di dalamnya anak-anak dan remaja, lansia, perempuan, individu yang hidup dalam kemiskinan, individu yang mempunyai keterbatasan fisik, orang yang sakit mental dan emosional, gay dan lesbian, dan kelompok minoritas.

Dalam melaksanakan komitmen untuk meningkatkan keberfungsian sosial orang, pekerja sosial menangani penyediaan intervensi sosial bagi mereka yang mempunyai keterbatasan kapasitas dan kesempatan untuk berfungsi secara penuh. Pelayanan intervensi sosial mungkin menjadi penanganan yang paling menolong. Akhirnya, karena orang mungkin ingin meningkatkan keberfungsian sosialnya ketika dia sedang menghadapi masalah yang membelitnya, maka pekerja sosial perlu memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada orang tersebut.

Intervensi sosial dapat meliputi tindakan dan upaya yang dirancang agar orang dapat memenuhi kebutuhan dan akses terhadap kebutuhan dasar (misalnya

makan, tempat tinggal, perlindungan dari bahaya, dan sebagainya) dan kesempatan untuk memenuhi kebutuhan psikososial seperti rasa memiliki, penerimaan dan ketenangan pada saat mengalami tekanan. Dalam intervensi pekerjaan sosial, fokusnya adalah menyediakan sumber-sumber yang dibutuhkan atau menolong klien agar bisa merasa nyaman walaupun sedang mengalami kesulitan.

Secara umum keberfungsian sosial merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap individu, dalam menyesuaikan diri dan mengatasi masalah yang dihadapinya. Hal ini berkaitan erat dengan interaksi antara individu dengan lingkungan sosialnya, sehingga memberikan hasil yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Definisi keberfungsian sosial adalah:

Social functioning relates to the behavioral patterns of the individual in the different roles and system that the individual forms part of his environment. The individual reacts with congruence among the four dimensions of his inner world situations in his environment. The individual experiences himself and his world distinct levels that relate to achievement, satisfactions and expectation on the one hand to frustrations, stress and helplessness on the other hand. Optimal social functioning assumes taht the positive forces will be stronger than the regressive forces. The social functioning of the individual always takes place in a specific time frame that is Integrated with the developmental phase in which the individual is functioning (Faul, 1995 dalam Fahrudin, 2018:12).

Definisi tersebut menunjukkan bahwa keberfungsian sosial memiliki enam buah indikator yaitu, indikator positif (pencapaian, kepuasan dan pengharapan) dan indikator negatif (stres, kekecewaan, ketidakberdayaan). Keberfungsian sosial

seseorang dinilai optimal apabila aspek positif tersebut lebih kuat dibandingkan dengan aspek negatifnya pada saat pengukuran dilakukan.

2.3.2. Karakteristik Keberfungsian Sosial

Fokus atau pusat perhatian pekerjaan sosial yaitu *social functioning* atau keberfungsian sosial. Pekerjaan sosial berusaha untuk memperbaiki, mempertahankan atau meningkatkan keberfungsian sosial orang, kelompok atau masyarakat. Definisi ke empat walaupun tidak menyebut keberfungsian sosial, secara tersirat juga tetap mempunyai fokus pada keberfungsian sosial orang. Hal ini tersirat dalam pernyataan bahwa pekerjaan sosial melakukan intervensi pada titik-titik di mana orang berinteraksi dengan lingkungannya.

Keberfungsian sosial merupakan fokus utama pekerjaan sosial. Keberfungsian sosial adalah kemampuan mengatasi (*coping*) tuntutan (*demands*) lingkungan yang merupakan tugas-tugas kehidupan (Bartlett, 1970 dalam Fahrudin, 2018:12).

Dalam kehidupan yang baik dan normal terdapat keseimbangan antara tuntutan lingkungan dan kemampuan mengatasinya oleh individu. Kalau terjadi ketidakimbangan antara keduanya maka terjadi masalah, misalnya tuntutan lingkungan melebihi kemampuan mengatasi yang dimiliki individu.

Dalam hal ini pekerjaan sosial membantu menyeimbangkan tuntutan lingkungan dengan kemampuan mengatasinya oleh individu.

Tuntutan (*demands*) \longleftrightarrow Kemampuan mengatasi (*coping*)

Keberfungsian sosial merujuk pada cara individu-individu atau kolektivitas-seperti keluarga, perkumpulan, komunitas, dan sebagainya-berperilaku untuk dapat

melaksanakan tugas-tugas kehidupan mereka dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka (Siporin, 1975 dalam Fahrudin, 2018:13).

Karena orang berfungsi dalam arti peranan-peranan sosial mereka, maka keberfungsian sosial menunjukkan kegiatan-kegiatan yang dipandang pokok untuk pelaksanaan beberapa peranan yang, karena keanggotaannya dalam kelompok-kelompok sosial, setiap orang diminta untuk melakukannya.

Peranan sosial, misalnya peranan sebagai suami, adalah pola tugas yang diharapkan dan perilaku lain yang berhubungan dengan status sosial. Setiap orang menduduki beberapa status sosial sekaligus, misalnya status sebagai suami, sebagai ayah, sebagai pegawai, sebagai warga masyarakat, dan sebagainya. Setiap status sosial disertai oleh peranan sosial tertentu, dan pelaksanaan peranan-peranan sosial ini menunjukkan keberfungsian sosial.

Keberfungsian sosial menunjukkan keseimbangan pertukaran, kesesuaian, kecocokan, dan penyesuaian timbal balik antara orang, secara individual atau secara kolektif, dan lingkungan mereka. Keberfungsian sosial dinilai berdasarkan apakah keberfungsian sosial tersebut memenuhi kebutuhan dan memberikan kesejahteraan kepada orang dan komunitasnya, dan apakah keberfungsian sosial itu normal dan dibenarkan secara sosial (Fahrudin, 2018:13).

Untuk mencapai keberfungsian sosial maka peranan sumber daya menjadi sangat penting. Kesempatan dan sumber-sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan sehingga memungkinkan pencapaian keberfungsian sosial internal sebagaimana mestinya. Seseorang dapat dikatakan berfungsi sosial apabila ia mampu menjalankan tugas-tugas kehidupannya melalui tiga cara yaitu:

1. Individu mampu menjalankan peranannya dengan baik. Peranan merupakan tingkah laku yang diharapkan ke atas orang yang memegang peranan itu. Dalam hal ini individu dapat mengefektifkan segala sesuatu yang diharapkannya untuk diwujudkan secara konkret.
2. Individu memiliki tanggung jawab terhadap orang lain. Ia mampu membuat keputusan yang rasional, dapat dipercaya dan mampu berupaya untuk kesejahteraan orang lain. Hal-hal yang dicapainya akan dijadikan modal untuk kegiatan selanjutnya.
3. Individu memperoleh kepuasan diri dari penampilan/kinerjanya dan tugas-tugasnya serta pelaksanaan tanggung jawabnya (Fahrudin, 2018:13).

Namun terkadang kegiatan-kegiatan yang dilakukan seseorang mengalami hambatan dan memberikan hasil tidak memuaskan, sehingga individu yang bersangkutan dikatakan tidak dapat menjalankan fungsi sosialnya. Kondisi seperti ini dapat dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

1. Kekurangan sumber-sumber internal

Kondisi tersebut mengakibatkan seseorang memiliki harapan yang semua, kebutuhan fisik dan psikis tidak terpenuhi, serta ketidakberdayaan dalam hidupnya. Secara situasional sumber-sumber internal diperlukan untuk membangun semangat individu dalam melangsungkan kehidupannya.

2. Pengaruh negatif faktor lingkungan

Kondisi tersebut berkaitan dengan perkembangan pengetahuan kemajuan teknologi dan yang tidak seimbang dengan kemampuan individu dalam menerimanya. Keterbatasan individu untuk memperoleh informasi, mengolah dan

memilah hal-hal yang bermanfaat mengakibatkan lemahnya kontrol sosial terhadap dampak negatif kemajuan tersebut. Hal ini memerlukan penyeimbangan antara peningkatan kemampuan individu sehingga dapat memilah hal-hal yang positifnya saja.

3. Kombinasi antara faktor personal dan lingkungan

Kondisi tersebut merupakan gabungan dari akibat-akibat yang ditimbulkan oleh faktor internal individu dan pengaruh lingkungan. Kombinasi masalah seperti ini memiliki dampak yang lebih kompleks terhadap terganggunya keberfungsian sosial seseorang (Fahrudin, 2018:14).

Dalam keadaan normal seseorang harusnya mampu melakukan tugas-tugas kehidupannya. Hal ini berkaitan erat dengan pemenuhan kebutuhan fisik dan psikis sebagai manusia. Terdapat lima tingkat kebutuhan manusia yaitu kebutuhan psikologis yang fundamental, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan kasih sayang kebutuhan untuk dihargai dan kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri (Maslow dalam Ife, 2001:76 dalam Fahrudin, 2018:14).

Berdasarkan hal tersebut maka setiap individu memiliki hak yang sama dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Namun pada kenyataannya masih ada individu-individu yang mengalami masalah dalam pemenuhan kebutuhan ketiga hal di atas menjadi pemicunya dan mengakibatkan pencapaian kondisi normal yang diharapkan menjadi terganggu.

“To enhance the social functioning of the client is alleviating them from stress and malfunctioning in their person situation system”. Hal ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan keberfungsian sosial klien, dapat dilakukan dengan

mengurangi stres dan menurunkan ketidakberfungsian yang terdapat dalam dirinya dan sistem yang berada di sekitarnya (Florence Hollis dalam Loewenberg, 1977:57 dalam Fahrudin, 2018:14).

Keberfungsian sosial biasanya dibagi ke dalam dua kategori yaitu keberfungsian sosial internal dan keberfungsian sosial eksternal. Proses pembentukan keberfungsian sosial internal memerlukan waktu yang cukup lama, karena dibutuhkan adaptasi untuk mempertahankan interaksi dengan lingkungannya. Pengaruh internal memegang peranan yang sangat besar untuk menyesuaikan pengalaman yang diterima, dengan kenyataan yang ada dalam kehidupan.

Segitiga keberfungsian sosial yang terdiri dari: *“feeling of self-worth, satisfaction with roles in life and positive relationships with others”*. Ketiga hal tersebut menunjukkan bahwa keberfungsian sosial seseorang tidak terlepas dari apa yang dirasakan oleh dirinya, perasaan berharga, kepuasan dengan peranan dalam kehidupannya dan hubungan positif dengan sesamanya (Skidmore, Farley dan Thackeray, 1991:19 dalam Fahrudin, 2018:15).

Secara umum segitiga keberfungsian sosial diutamakan pada pengungkapan perasaan individu sebagai pribadi yang berguna (*self-worth*). Hal ini difokuskan pada pembentukan kognisi seseorang untuk memaknai sebuah kejadian. Bila ia merasa sebagai orang yang berguna maka aspek-aspek positif keberfungsian sosial internalnya akan lebih menonjol dibandingkan dengan aspek-aspek negatifnya.

Pendapat tersebut serupa dengan pernyataan *“Supernatural beliefs tend to persist when they offer solutions to significant human problems. Because people*

who are uprooted are beset with intense stresses as they attempt to adapt to a strange land, they increase their reliance on spiritualism as a means of coping with these stresses” (Delgado dalam Loewenberg, 1977 dalam Fahrudin, 2018:15).

Hal ini menggambarkan bahwa keberfungsian sosial internal terletak pada keyakinan supernatural untuk menyelesaikan segala masalah yang signifikan. Stres, ketidakberdayaan dan kekecewaan yang muncul merupakan bagian dari ke mahan mereka terhadap kekuatan internal tersebut.

Individu beradaptasi memunculkan kemampuan mereka untuk mengatasi stres, kekecewaan dan ketidakberdayaan. Keberfungsian sosial internal seseorang harus segera dipulihkan saat ia m rasa tidak berdaya, tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan dan mengalami tekanan-tekanan dalam dirinya. Hal ini ditujukan agar mereka tidak mengalami ketidakberfungsian sosial internal, yang dapat menghambat aktivitas dalam kehidupan selanjutnya.

2.4. Tinjauan tentang Sikap

2.4.1. Pengertian Sikap

Sikap manusia atau untuk singkatnya disebut sikap, telah didefinisikan dalam berbagai versi oleh banyak ahli. Berkowitz bahkan menemukan adanya lebih dari tiga puluh definisi sikap (Berkowitz, 1972 dalam Azwar, 2022:5).

Puluhan definisi dan pengertian tersebut pada umumnya dapat dimasukkan ke dalam salah-satu di antara tiga kerangka pemikiran adalah sebagai berikut:

Pertama adalah kerangka pemikiran yang diwakili oleh para ahli psikologi seperti Louis Thurstone (1928; salah-seorang tokoh terkenal di bidang pengukuran sikap), Rensis Likert (1932; juga seorang pionir di bidang pengukuran sikap), dan

Charles Osgood. Menurut mereka, sikap adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. Sikap seseorang terhadap suatu objek adalah perasaan mendukung atau memihak (*favorable*) maupun perasaan tidak mendukung atau tidak memihak (*unfavorable*) terhadap objek tersebut (Berkowitz, 1972 dalam Azwar, 2022:5). Secara lebih spesifik, Thurstone sendiri menyebutkan sikap sebagai derajat afek positif atau afek negatif terhadap suatu objek psikologis (Edwards, 1957 dalam Azwar, 2022:5).

Kelompok pemikiran yang ke dua diwakili oleh para ahli antara lain Chave (1928), Bogardus (1931), LaPierre (1934), Mead (1934), dan Gordon Allport (1935; tokoh terkenal di bidang Psikologi Sosial dan Psikologi Kepribadian) yang konsepsi mereka mengenai sikap lebih kompleks. Menurut kelompok pemikiran ini, sikap merupakan semacam kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu objek dengan cara-cara tertentu. Dapat dikatakan bahwa kesiapan yang dimaksudkan merupakan kecenderungan potensial untuk bereaksi dengan cara tertentu apabila individu dihadapkan pada suatu stimulus yang menghendaki adanya respon. Definisi sikap sebagai ‘suatu pola perilaku, kecenderungan atau suatu kesiapan antisipatif, predisposisi untuk menyesuaikan diri dalam situasi sosial, atau secara sederhana dikatakan bahwa sikap merupakan respon terhadap stimuli sosial yang telah ‘terkondisikan’ (LaPierre 1934; dalam Allen, Guy, & Edgley, 1980 dalam Azwar, 2022:6).

Kelompok pemikiran yang ke tiga adalah kelompok berorientasi kepada suatu skema triadik (*triadic scheme*). Menurut kerangka pemikiran ini sikap merupakan konstelasi komponen-komponen kognitif, afektif, dan konatif yang

saling berinteraksi dalam memahami, merasakan, dan berperilaku terhadap suatu, objek. Definisi sikap sebagai ‘keteraturan tertentu dalam hal yang berkaitan dengan perasaan (afeksi), pemikiran (kognisi), dan predisposisi tindakan (konasi) seseorang terhadap suatu aspek di lingkungan sekitarnya’ (Secord & Backman, 1964 dalam Azwar, 2022:6).

Di samping ketiga kelompok pemikiran tradisional seperti diuraikan di atas, di kalangan para ahli Psikologi Sosial mutakhir terdapat pula cara lain yang populer dalam klasifikasi pemikiran tentang sikap. Kedua pendekatan termaksud adalah pendekatan *tricomponent* dan pendekatan *single-component* yang diuraikan berikut ini.

Pendekatan yang pertama adalah yang memandang sikap sebagai ‘kombinasi reaksi Afektif, Perilaku, dan Kognitif terhadap suatu objek’ (Breckler, 1984; Katz & Stotland, 1959; Rajecki, 1982; dalam Brehm & Kassin, 1990 dalam Azwar, 2022:6). Ketiga komponen tersebut secara bersama mengorganisasikan dan membentuk sikap dalam diri individu. Pendekatan ini, yang pada uraian di atas dikenal dengan nama skema triadik, disebut sebagai pendekatan *tricomponent*.

Pendekatan ke dua timbul dikarenakan ketidakpuasan atas penjelasan mengenai inkonsistensi yang terjadi di antara ketiga komponen Kognitif, Afektif, dan Perilaku dalam membentuk sikap. Oleh karena itu pengikut pendekatan ini memandang perlu untuk membatasi konsep sikap hanya pada aspek Afektif saja (*single-component*). Definisi yang mereka ajukan mengataka sikap tidak lain adalah ‘afek atau penilaian -positif atau negatif- terhadap suatu objek’. Di antara pengikut

pemikiran ini adalah Fishbein & Ajzen (1980), Oskamp, (1977), Petty & Cacioppo (1981) (Brehm & Kassin, 1990 dalam Azwar, 2022:7).

Kalau Thurstone menekankan definisinya pada intensitas afek terhadap suatu objek, maka Cacioppo dalam definisinya lebih menekankan aspek evaluasi atau penilaian sebagai karakteristik sikap yang lebih menentukan. Hal ini menurutnya dikarenakan sikap kadang-kadang tidak menimbulkan afek sama sekali. Sikap adalah evaluasi umum yang dibuat manusia terhadap dirinya sendiri, orang lain, objek, atau isu-isu (Petty & Cacioppo, 1986 dalam Baron & Byrne, 1991 dalam Azwar, 2022:7). Konsepsi respon-respon sikap yang bersikap kognitif, afektif, dan konatif sebagaimana dalam skema triadik di atas bukan sekedar cara klasifikasi definisi sikap melainkan lebih merupakan suatu telaah yang lebih dalam (Katz & Stotland, 1959 dan Smith, 1947 dalam Baron & Byrne, 1991 dalam Azwar, 2022:7).

Bagi para ahli ini, masing-masing aspek tersebut memang merupakan komponen yang konstruk teoretiknya berbeda satu sama lain. Sikap merupakan suatu konstruk multidimensional yang terdiri atas dimensi Kognisi, Afeksi, dan dimensi Konasi. Sekalipun kesemua komponen berada pada suatu kontinum evaluatif akan tetapi pernyataan masing-masing dapat berbeda (Breckler, 1984; Ostrom, 1969; dalam Ajzen, 1988 dalam Azwar, 2022:7). Sebagai contoh, orang yang cemas atau takut untuk bepergian dengan naik pesawat terbang (afek negatif terhadap penerbangan) dapat saja percaya bahwa pilot pesawat adalah orang yang terlatih dan berpengalaman dalam bidangnya (kognisi positif mengenai pilot) dan karenanya tetap bersedia untuk ikut terbang (konasi positif).

Ahli-ahli yang lain berteori bahwa konstruk kognisi, afeksi, dan konasi sebagai tiga komponen yang tidak menyatu langsung kedalam konsep mengenai sikap. Pandangan ini, yang dinamakan *tripartite model* yang dikemukakan oleh Rosenberg dan Hovang (1960; dalam Ajzen, 1988 dalam Azwar, 2022:8), menempatkan ketiga komponep afeksi, kognisi, dan konasi sebagai faktor jenjang pertama dalam suatu model hirarkis. Ketiganya didefinisikan tersendiri yang kemudian dalam abstraksi yang lebih tinggi membentuk konse sikap sebagai faktor tunggal jenjang ke dua.

Sikap manusia terhadap sesuatu objek mempunyai peranan sebagai perantara (*intervening*) antara responnya dan objek tersebut. Respon diklasifikasikan dalam tiga macam, yaitu respon Kognitif (respon perseptual dan pernyataan mengenai apa yang diyakini), respon Afektif (respon syaraf simpatetik dan pernyataan afeksi), serta respon perilaku atau Konatif (respon berupa tindakan dan pernyataan mengenai perilaku). Masing-masing klasifikasi respon tersebut berhubungan dengan ketiga komponen sikapnya.

Lebih lanjut disebutkan bahwa dengan melihat salah-satu saja di antara ketiga bentuk respon tersebut, sikap seseorang terhadap sesuatu sudah dapat diketahui arahnya. Deskripsi yang lengkap dan jelas mengenai sikap individu tentu harus diperoleh dengan melihat ketiga macam respon secara keseluruhan.

Adapun pengertian dari penilaian keterampilan sikap sosial yaitu penilaian yang dilakukan untuk mengetahui perkembangan sikap sosial siswa dalam menghargai, menghayati dan berperilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi dan gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara

efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya (Mulyana, 2021).

2.4.2. Struktur Sikap

Mengikuti skema triadik, struktur sikap terdiri atas tiga komponen yang saling menunjang satu sama lain yaitu komponen Kognitif (*cognitive*), komponen Afektif (*affective*), dan komponen Konatif (*conative*). Komponen kognitif merupakan representasi dari apa yang diketahui dan dibenarkan oleh individu pemilik sikap, komponen Afektif merupakan perasaan yang didasari oleh faktor emosi nonkognitif, sedangkan komponen konatif berupa kecenderungan untuk berperilaku tertentu sesuai dengan sikap yang dimiliki oleh seseorang. Rumusan dari ketiga komponen tersebut masing-masing sebagai komponen Kognitif (keyakinan), komponen Emosional (perasaan), serta komponen Perilaku (tindakan) (Kothandapani dalam Middlebrook, 1974 dalam Azwar, 2022:28).

Komponen kognitif berisi persepsi, kepercayaan, dan stereotipe individu mengenai sesuatu seringkali komponen kognitif dapat disamakan dengan pandangan (opini), terutama apabila menyangkut masalah isu atau *problem* yang kontroversial (Mann, 1969 dalam Azwar, 2022:28). Komponen Afektif adalah perasaan individu terhadap objek sikap dan berkaitan dengan masalah emosi. Aspek emosional inilah yang berakar paling dalam sebagai komponen Sikap dalam diri individual dan merupakan aspek yang paling bertahan terhadap pengaruh-pengaruh luar yang mungkin akan mengubah sikap seseorang. Komponen perilaku berisi tendensi atau kecenderungan individu untuk bertindak atau untuk bereaksi terhadap sesuatu dengan cara-cara yang sesuai sikapnya. Berikut adalah uraian lebih lanjut

ketiga komponen sikap tersebut dengan memberikan contoh objek sikapnya masing-masing.

1. Komponen Kognitif

Sebagaimana telah dikemukakan, komponen kognitif berisi kepercayaan seseorang mengenai apa saja yang berlaku atau apa yang diyakini benar bagi objek sikapnya. Sebagai contoh untuk memperjelas adalah isu mengenai lokalisasi pelacuran seba suatu objek sikap. Komponen kognitif sikap terhadap lokalisasi pelacuran adalah apa saja yang dipercayai seseorang mengenai lokalisasi termaksud. Seringkali dalam isu seperti ini, apa yang dipercayai seseorang itu merupakan stereotipe atau sesuatu yang telah terpolakan dalam fikirannya. Apabila telah terpolakan dalam fikiran bahwa pelacuran merupakan sesuatu yang negatif atau tidak baik maka lokalisasi pelacuran akan membawa asosiasi pola fikiran negatif tersebut lepas dari maksud dan tujuan pengadaan lokalisasi. Semua apapun juga yang menyangkut pelacuran akan membawa makna negatif dan individu menjadi percaya bahwa lokalisasi pelacuran pun membawa arti yang tidak baik itu.

Mengapa orang percaya atau mempunyai kepercayaan? Kepercayaan datang dari apa saja yang pernah dilihat atau apa yang telah diketahui. Penilaian terhadap apa yang telah dilihat itu kemudian membentuk suatu ide atau gagasan mengenai sifat atau karakteristik umum suatu objek. Setelah melihat, misalnya, bahwa ayam bertelur, bebek bertelur, burung dara bertelur, elang bertelur, maka individu percaya bahwa pelican (sebangsa burung yang langka ditemukan) juga dapat bertelur. Setelah mengetahui harga beberapa barang kebutuhan pokok naik

maka individu akan percaya bahwa sekarang semua barang kebutuhan hidup menjadi lebih mahal.

Sekali kepercayaan itu telah terbentuk, maka akan menjadi dasar bagi pengetahuan seseorang mengenai apa yang dapat diharapkan dari objek lain. Objek-objek yang memiliki keserupaan akan dipersepsikan secara kognitif dan disikapi dengan cara yang sama seperti objek yang telah diketahui sebelumnya. Generalisasi semacam itu menjadikan interaksi dengan pengalaman di masa datang serta prediksi mengenai pengalaman tersebut akan lebih mempunyai arti dan keteraturan. Tanpa adanya sesuatu yang dapat diyakini maka fenomena dunia di sekitar individu menjadi terlalu kompleks untuk dihayati dan sulit untuk ditafsirkan artinya, Kepercayaan lah yang menyederhanakan dan mengatur apa yang dilihat dan ditemui. Pengalaman memiliki beberapa teman yang berasal dari suku A, misalnya, membangun kepercayaan individu bahwa orang suku A mudah bergaul dan menyenangkan.

2. Komponen Afektif

Komponen Afektif menyangkut aspek emosional subjektif seseorang terhadap suatu objek sikap. Secara umum, komponen ini disamakan dengan perasaan yang dimiliki terhadap sesuatu, namun pengertian perasaan pribadi seringkali sangat berbeda perwujudannya bila dikaitkan dengan sikap. Komponen Afektif, yaitu komponen yang berhubungan dengan rasa senang atau tidak senang (emosional) atau penilaian terhadap obyek. Rasa senang merupakan hal positif, sedangkan rasa tidak senang merupakan hal yang negatif (Shaver dkk, 1977 dalam Dictio, 2019).

Sebagai contoh, dua orang yang mempunyai sikap negatif yang sama terhadap pelacuran misalnya, yang seorang bersikap negatif yang ketidaksukaannya ini berkaitan dengan ketakutannya akan akibat buruk dari perbuatan pelacuran (kognitif) sedangkan seseorang lain mewujudkan ketidaksukaannya dalam bentuk rasa benci atau rasa jijik terhadap segala sesuatu yang menyangkut pelacuran (afektif). Demikian pula halnya sikap negatif terhadap daging kuda dapat mengambil bentuk perasaan aneh terhadap daging kuda karena ketidakbiasaan atau ketidaklaziman sematamata (afektif) namun dapat pula sikap negatif itu didasari oleh perasaan takut bahwa daging kuda mengandung sesuatu yang tidak baik bagi kesehatan (kognitif). Sikap negatif yang sama dapat timbul dari landasan yang berbeda sumber dan berbeda pula perwujudannya.

Apakah yang menentukan reaksi emosional seseorang terhadap suatu objek? Pada umumnya, reaksi emosional yang merupakan komponen afektif tersebut banyak dipengaruhi oleh kepercayaan atau apa yang kita percayai sebagai benar dan berlaku bagi objek termaksud. Ketika individu percaya bahwa pelacuran akan membawa kekotoran dan ancaman terhadap kesehatan, maka akan terbentuk perasaan tidak suka atau afeksi yang tak-favorabel terhadap pelacuran. Apabila sudah mengetahui bahwa daging kuda sebenarnya lezat dan lebih besar manfaatnya daripada daging sapi, maka mungkin kemudian terbentuk afek positif terhadap daging kuda. Begitulah kaitan komponen kognitif dan afektif terbentuk, namun dapat terjadi bahwa apa yang telah diyakini sebagai benar bagi suatu objek (kognitif) tidak mengubah perasaan yang berlawanan terhadap objek tersebut (afektif).

3. Komponen Perilaku

Komponen perilaku atau komponen konatif dalam sikap menunjukkan bagaimana kecenderungan berperilaku perilaku yang ada dalam diri seseorang berkaitan dengan sikap yang dihadapinya. Kaitan ini didasari oleh asumsi bahwa keyakinan dan perasaan banyak berpengaruh terhadap perilaku. Maksudnya, bagaimana orang berperilaku dalam situasi dan terhadap stimulus tertentu akan banyak ditentukan oleh bagaimana kepercayaan dan perasaannya terhadap situasi dari stimulus tersebut. Kecenderungan berperilaku secara konsisten selaras dengan kepercayaan dan perasaan ini membentuk sikap individual. Karena itu, adalah logis untuk mengharapkan bahwa sikap seseorang akan dicerminkannya dalam bentuk tendensi perilaku terhadap objek. Apabila orang percaya bahwa daging kuda tidak enak rasanya, dan ia merasa tidak suka pada daging kuda, maka wajarlah apabila ia tak akan mau makan daging kuda.

Konsistensi antara keyakinan sebagai komponen kognitif perasaan sebagai komponen afektif, dan tendensi perilaku sebagai komponen konatif seperti itulah yang menjadi landasan dalam usaha penyimpulan terhadap sikap yang ditampakkan oleh respon terhadap skala sikap. Namun, sebagaimana diterangkan dalam bab terdahulu, adalah keliru bila mengharapkan adanya hubungan sistematis yang langsung antara sikap dengan perilaku nyata dikarenakan sikap tidaklah merupakan determinan satu-satunya bagi perilaku. Oleh karena itu, tidak tepat pula anggapan yang mengira bahwa komponen tendensi perilaku dalam struktur sikap merupakan komponen yang paling mudah untuk diungkap atau diukur.

2.4.3. Pembentukan Sikap

Sikap sosial terbentuk dengan adanya interaksi sosial yang dialami oleh individu. Interaksi sosial mengandung arti lebih dari sekedar terjadinya kontak sosial dan adanya hubungan antar individu sebagai anggota kelompok sosial. Dalam interaksi sosial, terjadi hubungan saling mempengaruhi di antara individu yang satu dengan yang lain, terjadi hubungan timbal balik yang dapat mempengaruhi sikap dan pola perilaku masing-masing individu sebagai anggota komunitas masyarakat. Lebih lanjut, pengertian interaksi sosial itu meliputi pula hubungan antara individu dengan lingkungan fisik maupun lingkungan psikologis di sekelilingnya.

Dengan interaksi sosialnya, individu bereaksi membentuk pola sikap tertentu terhadap berbagai objek psikologis dan fisik yang dihadapinya. Di antara berbagai faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap adalah pengalaman pribadi, kebudayaan yang ia berada di dalamnya, orang-orang lain yang penting dan berarti baginya, media massa, institusi atau lembaga pendidikan, dan lembaga agama, serta faktor emosi dalam diri seseorang. Uraian berikut akan membahas peranan masing-masing faktor tersebut dalam membentuk sikap manusia.

1. Pengalaman Pribadi

Apa yang telah dan sedang dialami akan ikut membentuk dan mempengaruhi penghayatan seseorang terhadap stimulus sosial. Tanggapan atau persepsi akan menjadi salah-satu dasar terbentuknya sikap. Untuk memiliki tanggapan dan penghayatan, seseorang harus mempunyai pengalaman yang berkaitan dengan objek psikologis. Apakah penghayatan itu kemudian membentuk sikap positif ataukah sikap negatif, akan tergantung pada banyak faktor lain. Dalam

hal ini, ketika tidak adanya pengalaman sama sekali dengan suatu objek psikologis maka individu cenderung akan membentuk sikap yang negatif terhadap objek tersebut (Middlebrook, 1974 dalam Azwar, 2022:36).

Pembentukan kesan atau tanggapan terhadap suatu objek merupakan proses kompleks dalam diri individu yang melibatkan individu yang bersangkutan, situasi ketika tanggapan terbentuk, dan atribut atau ciri-ciri objektif yang dimiliki oleh stimulus. Dalam suatu situasi emosional yang menekan (misalkan sewaktu sedang sangat lapar atau badan sedang sangat lelah, di suatu hari yang panas), kalau masuk ke sebuah restoran Cina dan mendapat layanan yang tidak memuaskan (misalkan sewaktu membayar ke kasir disambut dengan pandangan dingin dan tidak ramah) maka akan sangat mudah terbentuk kesan negatif terhadap orang Cina yang kemudian menjadi dasar pembentukan sikap negatif pula terhadap orang Cina. Sebaliknya, dalam suatu situasi emosional yang lain (misalkan sedang tertimpa musibah) tiba-tiba tanpa diduga mendapat kunjungan dari tetangga orang Cina di sebelah rumah yang memberikan sumbangan yang sangat dibutuhkan maka akan terbentuk kesan positif terhadapnya yang selanjutnya dapat menjadi dasar pembentukan sikap positif terhadap orang Cina.

2. Orang Lain yang Dianggap Penting

Orang lain di sekitar kehidupan merupakan satu di antara komponen sosial yang ikut berpengaruh terhadap sikap individu. Seseorang yang dianggap penting, seseorang yang diharapkan persetujuannya bagi setiap gerak tingkah dan pendapat individu, seseorang yang tidak ingin dikecewakan, atau seseorang yang berarti khusus baginya (*significant others*), banyak mempengaruhi pembentukan sikap

terhadap sesuatu. Di antara orang-orang yang biasanya dianggap penting bagi individu adalah orangtua, orang yang status sosialnya lebih tinggi, teman sebaya, teman dekat, guru, teman kerja, isteri atau suami, dan lain-lain.

Pada umumnya, individu cenderung untuk memiliki sikap yang konformis atau searah dengan sikap dari orang-orang yang dianggapnya penting. Kecenderungan ini antara lain dimotivasi oleh keinginan untuk berafiliasi dan keinginan untuk menghindari konflik dengan orang yang dianggap penting tersebut.

3. Kebudayaan

Budaya tempat di mana manusia diasuh dan dibesarkan mempunyai pengaruh besar terhadap pembentukan sikap. Apabila seseorang hidup dalam budaya yang mempunyai norma longgar bagi pergaulan heteroseksual, sangat mungkin ia akan memiliki sikap yang mendukung terhadap masalah kebebasan pergaulan heteroseksual. Apabila individu hidup dalam budaya sosial yang sangat mengutamakan cara kehidupan berkelompok, maka sangat mungkin ia akan mempunyai sikap negatif terhadap kehidupan individualisme yang mengutamakan kepentingan perorangan.

Seorang ahli Psikologi *Behaviorisme* yang terkenal, adanya peranan lingkungan (termasuk kebudayaan) dalam membentuk pribadi seseorang (Burrhus Frederic Skinner dalam Azwar, 2022:39). Kepribadian, katanya, tidak lain dari pola perilaku yang konsisten yang menggambarkan sejarah *reinforcement* yang telah dialami seseorang (Hergenhahn, 1982 dalam Azwar, 2022:39). Seseorang memiliki pola sikap dan perilaku tertentu dikarenakan ia mendapat *reinforcement* (penguatan, ganjaran) dari masyarakat untuk sikap dan perilaku tersebut, bukan

untuk sikap dan perilaku yang lain. Budaya masyarakat menjadi agen *reinforcer* yang signifikan bagi sikap dan perilaku individu.

Tanpa disadari, kebudayaan telah menanamkan garis arah dan cara manusia bersikap terhadap berbagai isu permasalahan. Kebudayaan telah mewarnai sikap anggota masyarakatnya, sebab kebudayaan pulalah yang memberi corak pengalaman individu-individu sebagai anggota kelompok masyarakat asuhannya. Hanya kepribadian individu yang telah mapan dan tertanam kuatlah yang dapat memudarkan dominansi kebudayaan dalam pembentukan sikap individual.

4. Media Massa

Sebagai sarana komunikasi, berbagai bentuk media massa seperti televisi, surat kabar, media komunikasi, media sosial, dan sebagainya mempunyai pengaruh besar dalam pembentukan opini dan kepercayaan seseorang. Dalam penyampaian informasi sebagai tugas pokoknya, media massa membawa pula pesan-pesan yang berisi sugesti dan persuasi, yang dapat mengarahkan opini seseorang. Adanya informasi baru mengenai sesuatu hal memberikan landasan kognitif baru untuk terjadinya perubahan sikap terhadap hal tersebut. Pesan-pesan sugestif yang dibawa oleh informasi tersebut, apabila cukup kuat, akan memberi dasar afektif dalam menilai sesuatu hal sehingga terbentuklah arah sikap tertentu.

Walaupun dahulu pengaruh media massa tidaklah sebesar pengaruh interaksi individual secara langsung namun dengan kemajuan teknologi komunikasi dan internet yang sangat pesat peranan media massa dan media sosial semakin penting dan tak dapat diabaikan dalam proses pembentukan dan perubahan sikap. Karena itulah, salah-satu bentuk informasi sugestif dalam media massa, yaitu iklan

selalu dimanfaatkan dalam dunia usaha guna meningkatkan penjualan atau memperkenalkan suatu produk baru.

5. Lembaga Pendidikan dan Lembaga Agama

Lembaga pendidikan serta lembaga agama sebagai suatu sistem mempunyai pengaruh besar dalam pembentukan sikap manusia dikarenakan keduanya meletakkan dasar pengertian dan konsep moral dalam diri individu. Pemahaman akan nilai baik dan buruk, garis pemisah antara sesuatu yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan, norma sosial, diperoleh dari pendidikan dan dari pusat keagamaan serta ajaran-ajarannya. Di samping keluarga dan orangtua, lembaga pendidikan merupakan faktor yang sangat penting dalam membangun *moral code* dalam diri anak yang kelak terinternalisasi sebagai bagian dari kepribadiannya (Bandura dalam Olson & Hergenhan, 2009 dalam Azwar, 2022:42).

Dikarenakan konsep moralitas dan ajaran agama sangat menentukan sistem kepercayaan maka tidaklah mengherankan kalau pada gilirannya kemudian konsep tersebut ikut berperan dalam menentukan sikap individu terhadap banyak hal. Apabila terdapat suatu hal yang bersifat kontroversial, pada umumnya seseorang akan mencari informasi lain untuk memperkuat posisi sikapnya atau mungkin juga orang tersebut tidak mengambil sikap memihak. Dalam hal seperti itu, ajaran moral yang diperoleh dari lembaga pendidikan atau dari agama dapat menjadi determinan tunggal yang menentukan sikap.

Contoh yang menarik di masa lalu adalah masalah undi porkas (pernah juga memiliki nama lain, yaitu SDSB) yang bagi sebagian orang tidak dianggap judi. Mereka yang melihat porkas sebagai hal yang tidak berkaitan dengan permasalahan

moral atau agama, mempunyai sikap yang bermacam-macam tergantung pada latar belakang pengalamannya yang berkaitan dengan yang kurang lebih serupa, tergantung pada sikap atasannya, pada faktor budaya setempat, pada pengaruh media massa, dan lain sebagainya.

6. Faktor Emosional

Tidak semua bentuk sikap manusia ditentukan oleh situasi lingkungan dan pengalaman pribadi seseorang. Kadang-kadang, suatu bentuk sikap merupakan pernyataan yang didasari oleh emosi yang berfungsi sebagai semacam penyaluran frustrasi atau pengalihan bentuk mekanisme pertahanan ego. Sikap demikian dapat merupakan sikap yang sementara dan segera berlalu begitu frustrasi telah hilang, akan tetapi dapat pula merupakan sikap yang lebih persisten dan bertahan lama.

Salah-satu contoh bentuk sikap yang dilandasi oleh faktor emosional adalah prasangka (*prejudice*). Prasangka didefinisikan sebagai sikap yang tidak toleran, tidak *fair*, atau tidak *favorabel* terhadap sekelompok orang (Harding, Prosbansky, Kutner, & Chein, 1969: dalam Wrightsman & Deaux, 1981 dalam Azwar, 2022:43). Bila prasangka ini digeneralisasikan pada individu-individu dari kelompok tertentu akan terjadilah persepsi stereotip yang merupakan sikap yang bias, yang selanjutnya dapat membangun stigma yang dilekatkan pada kelompok tersebut.

Prasangka seringkali merupakan bentuk sikap negatif yang didasari oleh kelainan kepribadian pada orang-orang yang sangat frustrasi. Sikap sangat anti Khadafi yang diperlihatkan oleh Reagan (sewaktu dia masih menjadi presiden Amerika), sangat boleh jadi adalah merupakan prasangka yang didasari oleh rasa ketakutan berlebihan dalam diri bekas presiden Amerika itu, bahwa orang Libya

akan selalu berusaha membunuhnya disertai oleh perasaan ketidakberdayaan terselubung dalam mempertahankan diri apabila orang Libya benar-benar datang untuk membunuhnya.

2.5. Tinjauan tentang Gizi

2.5.1. Pengertian Ilmu Gizi

Ghidza atau Gizi dalam bahasa arab, merupakan asal kata dari gizi. Ghidza berarti makanan (Almatsier, 2016 dalam Purba, 2021). Sejalan dengan definisi tersebut, gizi disebut sebagai zat yang terkandung dalam makanan yang kita konsumsi. Zat tersebut diperlukan untuk mendukung proses tumbuh kembang badan kita, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (Setiawan, 2019 dalam Purba, 2021). Gizi juga dapat diartikan sebagai ilmu yang melibatkan berbagai aktivitas kimia dan fisiologis, yang mengubah komponen dalam bahan makanan menjadi zat yang dapat dimanfaatkan untuk metabolisme tubuh (Academy of Nutrition dan Dietetic, 2020 dalam Purba, 2021).

Definisi ilmu gizi pada awalnya adalah ilmu yang mempelajari nasi makanan sejak mulai ditelan sampai diubah menjadi bagus tubuh dan energi atau dieksresikan sebagai sisa. Pengertian itu kemudian berkembang seiring dengan tujuan akhir ilmu gizi yan untuk mencapai, memperbaiki, dan mempertahankan kesehatan tubuh melalui konsumsi makanan (Sulistyoningsih, 2011:2).

Definisi ilmu gizi yang digunakan sekarang adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang makanan dikaitkan dengan kesehatan tubuh. Definisi ini memungkinkan kajian dan ruang lingkup ilmu gizi menjadi lebih luas, tidak terbatas pada makanan yag dikonsumsi.

Istilah lain yang berkaitan dengan gizi dan penting dipahami diantaranya:

1. Zat Gizi (*Nutrients*) adalah ikatan kimia yang diperlukan tubuh untuk melakukan fungsinya, yaitu menghasilkan energi membangun dan memelihara jaringan serta mengatur proses proses kehidupan.
2. Gizi (*Nutrition*) adalah suatu proses organisme menggunakan makanan yang dikonsumsi secara normal melalui proses digesti, absorpsi, transportasi, penyimpanan, metabolisme dan pengeluaran zat-zat yang tidak digunakan, untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan dan fungsi normal dari organ-organ, serta menghasilkan energi (Rusilanti, 2015:1).
3. Pangan adalah istilah umum untuk semua bahan yang dapat dijadikan makanan, baik dalam kondisi mentah atau matang, hasil olahan ataupun bahan mentah.
4. Makanan adalah bahan selain obat yang mengandung zat gizi & atau unsur-unsur/ikatan kimia yang dapat diubah menjadi zat oleh tubuh, dan berguna bila dimasukkan ke dalam tubuh.
5. Bahan makanan adalah makanan dalam keadaan mentah (belum mengalami proses pengolahan).
6. Status gizi adalah keadaan tubuh sebagai akibat konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi (Sulistyoningsih, 2011:2).

Dalam ilmu gizi dikenal lima macam zat gizi, yaitu karbohidrat, lemak, protein, mineral dan vitamin. Secara umum fungsi dari zat-zat makanan adalah:

1. Sumber energi atau tenaga. Jika fungsi ini terganggu, orang menjadi berkurang gerakannya atau kurang giat dan merasa cepat lelah.
2. Menyokong pertumbuhan badan, yaitu penambahan sel baru pada sel yang sudah ada.
3. Memelihara jaringan tubuh, mengganti yang rusak atau aus terpakai, seperti mengganti sel yang tampak jelas pada luka tubuh yaitu terjadinya jaringan penutup luka.
4. Mengatur metabolisme dan berbagai keseimbangan dalam cairan tubuh (keseimbangan air, asam basa, dan mineral)
5. Berperan dalam mekanisme pertahanan tubuh terhadap berbagai penyakit sebagai antioksidan dan antibodi lainnya (Handoko, 2020).

2.5.2. Ruang Lingkup Ilmu Gizi

Ilmu gizi merupakan ilmu terapan yang mempergunakan berbagai disiplin ilmu dasar, sehingga untuk menguasainya secara ahli harus menguasai ilmu dasar yang relevan dengan kebutuhan ilmu gizi, diantaranya adalah biologi, biokimia, dan fisiologi (Sulistyoningsih, 2011:4).

Ilmu gizi pada awalnya hanya mencakup ruang lingkup yang sangat sempit, namun kemudian terus berkembang seiring dengan ditemukannya berbagai peralatan modern yang turut membantu pengembangan ilmu gizi dan kesehatan. Berbagai konsep baru yang berkaitan dengan gizi juga ditemukan, diantaranya pengaruh keturunan terhadap kebutuhan gizi, pengaruh gizi terhadap perkembangan otak, pengaruh gizi terhadap produktivitas, pengaruh faktor lingkungan terhadap status gizi dan masih banyak lagi. Perkembangan ilmu gizi

menyebabkan ruang lingkup ilmu gizi juga menjadi luas dan bersinggungan dengan ilmu ilmu lain, seperti agronomi, peternakan, mikrobiologi, kedokteran, pertanian, dan yang lainnya.

Terdapat dua komponen penting yang menjadi pusat perhatian dalam ruang lingkup ilmu gizi, yaitu makanan dan kesehatan. Ilmu gizi mendalami persoalan pangan dan kesehatan yang berkaitan dengan makanan tersebut. Sehubungan dengan itu, komponen yang terkait dengan ilmu gizi diantaranya: penyediaan pangan (meliputi produksi bahan pangan, pascapanen, serta teknologi pangan), pengolahan pangan, pendidikan gizi, serta kesehatan gizi.

Lingkup ilmu gizi terkait dengan kesehatan yang sekarang ini menjadi perhatian diantaranya adalah berbagai pemeriksaan, baik fisik, klinis, antropometri, radiologi, ataupun biokimia yang diperlukan untuk mendeteksi status gizi seseorang. Hal lain adalah mengenai penyampaian informasi gizi kepada masyarakat, khususnya mengenai kebutuhan gizi, makanan bergizi serta dampaknya terhadap kesehatan.

2.5.3. Peranan Gizi dalam Kesehatan

Konsumsi gizi sangat mempengaruhi status gizi kesehatan seseorang yang merupakan modal utama bagi kesehatan individu. Asupan gizi yang salah atau tidak sesuai akan menimbulkan masalah kesehatan. Istilah *malnutrition* (gizi salah) diartikan sebagai keadaan asupan gizi yang salah, dalam bentuk asupan berlebih ataupun kurang, sehingga menyebabkan ketidakseimbangan antara kebutuhan dengan asupan (Sulistyoningsih, 2011:5).

Masalah kesehatan di Indonesia, yang muncul sebagai akibat asupan gizi yang kurang diantaranya adalah Kekurangan Vitamin A (KVA), Gangguan akibat kekurangan yodium (GAKY), Anemia, Kekurangan Energi Protein (KEP). Selain masalah gizi kurang, akhirakhir ini ditemukan juga dampak dari konsumsi berlebih, tidak hanya pada orang dewasa tetapi juga pada anak dan remaja.

Masalah yang sering muncul adalah obesitas (berat badan berlebih), yang akan diikuti dengan timbulnya penyakit seperti jantung koroner, diabetes mellitus, stroke dan yang lainnya. Selain itu, gizi juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan otak dan perilaku, kemampuan bekerja dan produktivitas serta daya tahan terhadap penyakit infeksi. Dampak konsumsi zat gizi terhadap kesehatan akan disampaikan lebih jela pada pembahasan di bab berikutnya.

Gizi juga mempunyai peran yang besar terhadap tingka kesembuhan dan lama perawatan orang yang sedang sakit. Masalah gizi yang timbul pada orang sakit akan berdampak pada banyak hal yaitu gangguan syaraf, pembedahan, kanker, kejiwaan, dan gangguan Rastrointestinal. Kekurangan gizi berdampak pada beberapa perubahan penting dalam sistem metabolisme tubuh, diantaranya penurunan tingkat filtrasi pada glomerular yang terjadi di ginjal, gangguan pada pertahanan intestinal di lambung dan saluran cerna secara umum, perubahan pada farmakokinetik dan perubahan pada fungsi kardiak jantung.

Berdasarkan jumlah yang dibutuhkan tubuh, ada 2 pengelompokan besar dari zat gizi yaitu zat gizi Makro dan zat gizi Mikro. Zat gizi makro merupakan zat gizi yang dibutuhkan dalam jumlah besar. Zat gizi yang termasuk kelompok zat gizi makro adalah karbohidrat, protein dan lemak. Zat gizi makro ini biasanya

menggunakan satuan gram. Zat gizi mikro merupakan zat gizi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah kecil atau sedikit. Zat gizi yang termasuk kelompok zat gizi mikro adalah mineral dan vitamin. Zat gizi mikro menggunakan satuan mg untuk sebagian besar mineral dan vitamin. Contoh zat gizi mikro di antaranya adalah beragam jenis vitamin mulai dari vitamin A, B, C, D, E, K dan berbagai jenis mineral seperti zat besi, yodium, seng, dsb (Buanasita, 2020).

.Pemenuhan kebutuhan gizi akan berdampak pada kondisi kesehatan, dan bisa juga berlaku sebaliknya, yaitu status kesehatan (terutama infeksi) akan berdampak kepada status gizi seseorang. Penyakit infeksi yang diderita akan menyebabkan hilangnya nafsu makan sehingga asupan makanan menjadi kurang sedangkan tubuh membutuhkan asupan yang lebih banyak karena proses destruksi jaringan dan meningkatnya suhu tubuh.

Salah satu penyakit yang seringkali dikaitkan langsung dengan status gizi adalah Tuberkulosis (TBC). Masalah kurang gizi pada penderita TBC merupakan masalah penting, karena selain mempunyai risiko terhadap penyakitnya, juga dapat mempengaruhi produktivitas kerja penderitanya. Sebagai penyakit infeksi, TBC bisa mempengaruhi status gizi penderita karena proses perjalanan penyakitnya yang mempengaruhi daya tahan tubuh. Selain TBC, diare adalah penyakit yang besar pengaruhnya terhadap status gizi, terutama bayi dan balita.

Khusus bagi perempuan, gizi memiliki peran yang sangat penting dalam kesehatan reproduksinya, sejak masih berupa janin hingga usia lanjut. Siklus kehidupan perempuan dibagi dalam tahap masa kecil dan masa anak-anak, masa remaja, masa reproduksi (hamil dan menyusui) dan masa akhir kehidupan.

Perempuan memiliki kebutuhan yang lebih khusus dibandingkan laki-laki karena perempuan memiliki kodrat untuk mengalami haid, hamil, melahirkan, dan menyusui. Kondisi ini menyebabkan perempuan memerlukan pemenuhan gizi dan pemeliharaan kesehatan yang lebih intensif selama fase kehidupannya. Permasalahan gizi yang timbul pada salah satu masa yang dilalui akan berdampak pada proses reproduksi seorang perempuan.

2.5.4. Pengelompokan Zat Gizi Menurut Fungsi dan Kebutuhan

Pengelompokan zat gizi berdasarkan jumlah yang dibutuhkan oleh tubuh terbagi atas dua, yaitu zat gizi makro (*macronutrient*) dan zat gizi mikro (*micronutrient*). Zat gizi makro adalah zat gizi yang dibutuhkan dalam jumlah besar dengan satuan gram (gr), sedangkan zat gizi mikro adalah zat gizi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah kecil, sebagian besar dibutuhkan dalam satuan milligram (mg). Kelompok zat gizi makro terdiri dari karbohidrat, lemak dan protein, sedangkan kelompok zat gizi mikro adalah mineral dan vitamin (Sulistyoningsih, 2011:7).

Selain lima jenis zat gizi yang telah disebutkan (karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral), ada kelompok ahli gizi yang menambahkan air dan oksigen sebagai zat gizi. Kelompok ini mengkategorikan air dan oksigen sebagai zat gizi dikarenakan pada proses metabolisme zat gizi selalu diperlukan air dan oksigen.

Namun ada juga kelompok lain yang menganggap air dan oksigen bukan merupakan zat gizi dikarenakan air dan oksigen merupakan: zat tunggal, hanya memiliki satu jenis struktur molekul, yaitu H_2O dan O_2 sedangkan zat gizi lain merupakan kumpulan dari ikatan dengan struktur yang berbeda namun memiliki fungsi atau karakteristik yang sama jika ditinjau dari sudut ilmu gizi.

Jika dilihat dari fungsi zat gizi dalam tubuh, zat gizi dikelompokkan menjadi:

1. Memberi energi (zat pembakar)

Zat gizi utama sebagai sumber energi adalah karbohidrat, lemak dan protein, Ketiganya merupakan ikatan organik yang mengandung karbon yang dapat dibakar menjadi energi dan dibutuhkan tubuh untuk melakukan kegiatan/aktivitas.

2. Pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan tubuh (zat pembangun)

Jenis zat gizi yang dibutuhkan untuk membentuk sel-sel baru, memelihara, dan mengganti sel yang rusak adalah protein, mineral dan air.

3. Mengatur proses tubuh (zat pengatur)

Protein, mineral, air dan vitamin, diperlukan dalam mengatur proses di dalam tubuh. Protein bertujuan mengatur keseimbangan air di dalam sel, bertindak sebagai *buffer* dalam upaya memelihara netralitas tubuh dan membentuk antibodi sebagai penangkal organisme dan bahan-bahan asing yang dapat masuk ke dalam tubuh. Mineral dan vitamin sebagai pengatur dalam proses-proses oksidasi, fungsi normal saraf dan otot serta proses lain yang terjadi dalam tubuh, seperti dalam darah, cairan pencernaan, jaringan, mengatur suhu tubuh, peredaran darah, serta pembuangan sisa-sisa/ekskresi.

4. Anti oksidan

Zat anti oksidan adalah substansi yang dapat menetralkan atau menghancurkan radikal bebas. Radikal bebas merupakan jenis oksigen yang memiliki tingkat reaktif yang tinggi dan secara alami ada di dalam tubuh sebagai hasil dari reaksi biokimia di dalam tubuh. Radikal bebas terdapat di lingkungan

sekitar kita yang berasal dari polusi udara, asap tembakau, penguapan alkohol yang berlebihan, bahan pengawet dan pupuk, sinar Ultra Violet, X-rays, dan ozon. Radikal bebas dapat merusak sel tubuh dan dapat menyebabkan berkembangnya sel kanker, penyakit hati, arthritis, katarak, dan penyakit degeneratif lainnya, bahkan jug mempercepat proses penuaan. Zat gizi yang juga berperan sebagai antioksidan adalah vitamin A, beta-karoten, vitamin C, seng, dan selenium.

5. Meningkatkan respon kekebalan

Gizi merupakan faktor penentu yang penting dari respon kekebalan tubuh. Kekurangan zat gizi mikro seperti seng, selenium, besi, tembaga, vitamin A, vitamin C, vitamin E, vitamin B-6, dan asam folat akan mempengaruhi respon kekebalan. Kekurangan vitamin A dapat menyebabkan rusaknya pertahanan di permukaan epitel yang disebabkan rusaknya struktur epitel, terjadi perubahan mukus, dan menurunnya sekretori IgA, fungsi neutrofil, makrofag, dan natural defisiensi vitamin A juga akan mengubah sel B dan sel T proliferasi, sedangkan vitamin C berperan dalam migrasi dan fagitosis makrofag dan neutrofil (Sulistyoningsih, 2011:8).

2.6. Tinjauan tentang Balita

2.6.1. Pertumbuhan Balita

Balita atau dikenal juga dengan anak prasekolah adalah anak yang berusia antara 1 sampai 5 tahun, sedangkan usia sekolah adalah anak yang berusia 6-12 tahun (Sulistyoningsih, 2011:184). Selama usia sekolah, pertumbuhan tetap terjadi walau tidak dengan kecepatan pertumbuhan secepat yang terjadi sebelumnya pada masa bayi atau pada masa remaja nantinya. Rata-rata pertumbuhan tiap tahun

seorang anak pada usia sekolah adalah berkisar 3-3.5 kg untuk berat dan sekitar 6 cm untuk ketinggian (Behrman, 2004 dalam (Sulistyoningsih, 2011:184).

Anak-anak pada periode usia ini tetap mempunyai dorongan pertumbuhan yang biasanya bertepatan dengan periode peningkatan masukan dan nafsu makan. Ketika memasuki periode pertumbuhan yang lebih lambat, masukan dan nafsu makan seorang anak juga akan berkurang. Adanya variasi dalam hal nafsu makan dan asupan makanan pada anak usia sekolah harus dipahami oleh para orang tua agar dapat memberikan respon yang baik terhadap setiap kondisi yang terjadi pada anak.

2.6.2. Perkembangan Balita

1. Perkembangan Fisiologik

Kekuatan otot, koordinasi motorik dan stamina anak usia sekolah meningkat secara progresif. Anak-anak mampu melakukan gerakan-gerakan dengan pola yang lebih kompleks, sehingga memacu mereka untuk mengikuti kegiatan-kegiatan seperti dansa, olahraga, gimnastik dan aktivitas fisik lainnya.

Selama awal periode usia sekolah, persentase lemak tubuh mencapai minimum 16% pada perempuan dan 13% pada laki-laki. Persentase lemak tubuh kemudian meningkat sebagai persiapan menghadapi dorongan pertumbuhan remaja. Peningkatan persentase lemak tubuh di masa pubertas terjadi lebih dini dan lebih tinggi pada perempuan dibandingkan dengan pada laki-laki (19% pada perempuan dan 14% pada laki-laki). Memasuki pertengahan usia sekolah, laki-laki memiliki masa tubuh yang lebih tipis per sentimeter per tinggi badan dibandingkan

dengan perempuan. Perbedaan komposisi tubuh ini akan lebih tampak nyata pada masa remaja.

Peningkatan lemak tubuh pada usia anak sekolah merupakan bagian dari pertumbuhan dan perkembangan yang normal. Perubahan ini pada umumnya tidak permanen dan para orangtua juga harus berhati-hati agar tidak terlalu mempermasalahkan ukuran dan berat badan. Anak laki-laki pada usia mulai menaruh perhatian terhadap perkembangan otot tetapi sebenarnya peningkatan masa otot akan mulaiterjadi ketika memasuki usia pertengahan remaja.

2. Perkembangan Kognitif

Pencapaian perkembangan yang paling pokok pada pertengahan usia sekolah adalah kemampuan diri, pengetahuan tentang apa yang akan dikerjakan dan kemampuan untuk melakukannya. Selama usia sekolah, anak-anak bergerak dari periode perkembangan praoperasional ke arah satu tindakan nyata. Tingkatan ini ditandai dengan kemampuan untuk mengarah kepada berbagai aspek situasi pada saat yang bersamaan; mampu memiliki alasan yang lebih rasional dalam hal sebab-akibat; mampu menggolongkan atau menggolongkan kembali dan menggeneralisasikan, serta mengurangi egosentrisme, yang memungkinkan seorang anak melihat pandangan orang lain.

Karakteristik kognitif yang dimiliki anak usia sekolah adalah sebagai berikut:

1. Anak sudah mampu memberikan perhatian pada beberapa aspek.
2. Anak mulai memiliki alasan rasional dan sistematis.

3. Anak mulai mengembangkan rasa percaya diri sendiri, semakin independen dan mempelajari perannya dalam keluarga, di sekolah maupun di masyarakat.
4. Egosentris anak mulai berkurang, anak mulai dapat menerima pendapat orang lain.
5. Terkait dengan pola makan, anak mulai menyadari pentingnya makanan bergizi untuk pertumbuhan dan kesehatan, meyakini pentingnya waktu makan, serta mulai timbul konflik dalam pemilihan waktu makan.
6. Pengaruh lingkungan terhadap anak mulai meningkat.
7. Hubungan *peer* meningkat sangat penting, dan anak mulai memisahkan diri dari keluarganya sendiri dengan menghabiskan waktu malamnya di rumah teman atau relasinya (Sulistyoningsih, 2011:185).